



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA Triwulan II 2024

BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG
2024



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSRé, BSSN

Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun dalam rangka memberikan informasi mengenai capaian kinerja BPSPL Padang selama periode triwulan II melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama dengan hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Laporan ini juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPSPL Padang kepada para pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan II 2024.

Di samping itu, laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pada tahun berikutnya. Kritik, masukan, dan saran sangat kami harapkan untuk memperbaiki kekurangan laporan ini. Atas perhatian dan dukungan semua pihak diucapkan terima kasih.

Padang, 19 Juli 2024
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang



Ditandatangani
Secara Elektronik

Fajar Kurniawan, S.T., M.AP., M.MG.

Ringkasan Eksekutif

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan II 2024 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagai upaya dalam mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang menguraikan penjabaran visi misi yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran strategis yang di turunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran 2024. Pada tahun 2024, terdapat sebelas sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Lebih lanjut, dilakukan pengukuran capaian kinerja yang dilakukan setiap triwulannya untuk memperoleh gambaran konkret terkait aspek ketercapaian kinerja secara kuantitatif. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode triwulan II 2024 adalah **117,41 (kategori istimewa)**. Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang triwulan II 2024:

1. Nilai PNBP BPSPL Padang dengan target Rp650.000,000 belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan,
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 320 Orang belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Daerah belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Kesepakatan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 3 Kelompok dan target pada triwulan II 1 Kelompok; telah tercapai 2 Kelompok pada triwulan II.
7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru dengan target 1 Kelompok belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 8 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan II karena memiliki periode pengukuran tahunan.
9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 5 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan II karena memiliki periode pengukuran tahunan.

10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 4 Kawasan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 93,76 dan target triwulan II 83; telah mencapai 99,27 pada triwulan II.
13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang dengan target 86 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
14. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di BPSPL Padang dengan target 75 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 88 dan target triwulan II 83; telah tercapai 90,92 pada triwulan II.
16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dengan target 81 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
17. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 2 dokumen dari target tahunan 4 dokumen; capaian sesuai dengan target triwulannya.
18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 133,33% dari target 94%.
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 80%.
20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target 100% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang dengan target 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang dengan target 65 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan II 2024 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam perkembangannya, seluruh pagu anggaran yang sempat terdampak blokir telah dibuka pada tanggal 20 Juni 2024. **Hingga triwulan II 2024, realisasi anggaran mencapai Rp8.696.935.695,00** (Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) **dengan persentase 51,45%**. Adapun efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

Upaya tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya telah diwujudkan melalui monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) dan penyelesaian laporan pendataan teripang. Dalam upaya tindak lanjutnya, BPSPL Padang telah melaksanakan monitoring RPD dan memantau keselarasan antara target dan realisasi penyerapan anggaran. Dalam hal penyelesaian laporan pendataan teripang, laporan telah terselesaikan dan terdokumentasikan pada April 2024. Sementara itu, untuk menindaklanjuti permasalahan yang teridentifikasi pada triwulan II 2024, langkah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan review Rencana Aksi untuk menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan beserta target pencapaian *output*-nya.



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel.....	xiii
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	1
1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis.....	4
1.4 Sistematika Penyajian Laporan	8
II. Perencanaan Kinerja.....	9
2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	9
2.2. Postur Anggaran 2024	10
III. Akuntabilitas Kinerja.....	12
3.1. Capaian Kinerja	12
IKU. 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	15
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	15
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	15
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan target Tahunan..	15
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	15
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	16
F. Realisasi Anggaran.....	17
IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang).....	17
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	17
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	17
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.	18
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	18
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	18
F. Realisasi Anggaran.....	18
IKU. 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)	19



A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulanan Berjalan	19	
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	19	
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	19	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	20	
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	20	
F.	Realisasi Anggaran.....	23	
IKU. 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah).....			23
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	23	
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	24	
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	24	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	24	
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	24	
F.	Realisasi Anggaran.....	25	
IKU. 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)			25
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	25	
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	25	
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.	26	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	26	
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	26	
F.	Realisasi Anggaran.....	27	
IKU. 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)			28
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	28	
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	29	
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	29	
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	30	
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	30	
F.	Realisasi Anggaran.....	32	



IKU. 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	32
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan	32
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	33
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	33
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	33
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	33
F. Realisasi Anggaran.....	33
IKU. 8. Jenis Ikan Terancam Puna yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	34
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan	34
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	34
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	35
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	35
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	36
F. Realisasi Anggaran.....	47
IKU. 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	48
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan	48
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	48
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	48
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	49
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	49
F. Realisasi Anggaran.....	52
IKU. 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen) 53	
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan	53
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	53
C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	53
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	54



E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
F.	Realisasi Anggaran.....	55
IKU. 11.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan).....	56
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	56
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	56
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	56
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	57
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	57
F.	Realisasi Anggaran.....	59
IKM. 12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)	59
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	59
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	60
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	60
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	60
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	60
F.	Realisasi Anggaran.....	61
IKM. 13.	Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai).....	61
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	61
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	61
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	61
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	62
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	62
F.	Realisasi Anggaran.....	62
IKM. 14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)	62
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	63
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	63
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	63



D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	64
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	64
F.	Realisasi Anggaran.....	65
IKM. 15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks).....	65
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	65
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	66
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	66
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	66
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	67
F.	Realisasi Anggaran.....	67
IKM. 16.	Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang	67
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	67
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	68
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	68
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	68
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	68
F.	Realisasi Anggaran.....	69
IKM. 17.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen).....	70
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	70
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	70
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	70
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	71
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	71
F.	Realisasi Anggaran.....	71
IKM. 18.	Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	71
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	72
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya	72
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan .	72



D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	72
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	73
F.	Realisasi Anggaran.....	73
IKM. 19.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%).....	73
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	73
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	74
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	74
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	75
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	75
F.	Realisasi Anggaran.....	75
IKM. 20.	Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%).....	75
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	76
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	76
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	76
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	76
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	77
F.	Realisasi Anggaran.....	77
IKM. 21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%).....	77
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	78
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	78
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	78
D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	78
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	79
F.	Realisasi Anggaran.....	79
IKM. 22.	Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai).....	80
A.	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan.....	80
B.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya.....	81
C.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan.....	81



D.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	81
E.	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	81
F.	Realisasi Anggaran.....	81
3.2.	Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis	82
3.3.	Realisasi Anggaran.....	83
IV.	Penutup	85
4.1.	Kesimpulan.....	85
4.2.	Rekomendasi.....	86
A.	Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan IV 2023	86
B.	Rekomendasi Triwulan II 2024	86
LAMPIRAN	87

Daftar Gambar

Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024.....	2
Gambar 2. Komposisi SDM BPSPL Padang.....	2
Gambar 3. Struktur Organisasi BPSPL Padang.....	3
Gambar 4. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang.....	8
Gambar 5. Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2024.....	11
Gambar 6. NKO BPSPL Padang Triwulan II 2024.....	12
Gambar 7. Realisasi Pendapatan PNB BPSPL Padang Triwulan II 2024.....	16
Gambar 8. Realisasi Penggunaan Dana PNB Hingga Triwulan II 2024 Lingkup BPSPL Padang.....	16
Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang.....	21
Gambar 10. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Hingga Triwulan II 2024.....	21
Gambar 11. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Hingga Triwulan II 2024.....	22
Gambar 13. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama FKP USK.....	27
Gambar 14. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama Tim Sekretariat DJPKRL.....	27
Gambar 15. Dokumentasi Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang.....	31
Gambar 16. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang.....	31
Gambar 17. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving.....	32
Gambar 18. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya.....	36
Gambar 19. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar.....	36
Gambar 20. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai.....	37
Gambar 21. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	38
Gambar 22. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar.....	38
Gambar 23. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya.....	38
Gambar 24. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Besar.....	39
Gambar 25. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan.....	39
Gambar 26. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Pasaman Barat.....	40
Gambar 27. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Bintang.....	40
Gambar 28. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo.....	40
Gambar 29. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim.....	41
Gambar 30. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Ogan Ilir.....	41
Gambar 31. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kota Prabumulih.....	41
Gambar 32. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Bungo.....	42
Gambar 33. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR.....	42
Gambar 34. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu.....	42
Gambar 35. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Kabupaten Bengkulu.....	43
Gambar 36. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak.....	43
Gambar 37. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Sarolangun.....	44
Gambar 38. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Ogan Ilir.....	44
Gambar 39. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Muara Enim.....	45
Gambar 40. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Rokan Hulu.....	45
Gambar 41. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar.....	46
Gambar 42. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Muaro Jambi.....	47
Gambar 43. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Ogan Ilir.....	47
Gambar 44. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Kota Banda Aceh.....	50
Gambar 45. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan.....	50
Gambar 46. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Ujong Serangga, Aceh Barat Daya.....	50
Gambar 47. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga.....	51
Gambar 48. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkulu.....	51
Gambar 49. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti.....	51



Gambar 50. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut.....	52
Gambar 51. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Natuna	52
Gambar 52. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam.....	52
Gambar 53. Dokumentasi Sosialisasi dan Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai	55
Gambar 54. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi	55
Gambar 55. Rekapitulasi Sampah pada Gernas Bulan Cinta Laut di Wilker BPSPL Padang Hingga 1 Juli 2024	58
Gambar 56. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang	58
Gambar 57. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam	58
Gambar 58. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang	58
Gambar 59. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang	59
Gambar 60. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang.....	74
Gambar 61. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Banyu Biru.....	79
Gambar 62. Dokumentasi Pemantauan terhadap Pokmaswas Hiu Macan.....	79



Daftar Tabel

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang	9
Tabel 2. Penambahan Indikator Kinerja Tahun 2024	10
Tabel 3. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Sempat Terdampak Blokir	11
Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Triwulan II 2024	12
Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1	15
Tabel 6. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 1	17
Tabel 7. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi	18
Tabel 8. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 2	19
Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3	19
Tabel 10. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang	20
Tabel 11. Verifikasi Lapangan KKPRL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2024	22
Tabel 12. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 3	23
Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4	23
Tabel 14. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang	24
Tabel 15. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4	25
Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5	25
Tabel 17. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang	26
Tabel 18. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5	27
Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6	28
Tabel 20. Penerima Bantuan Konservasi Hingga Triwulan II 2024	28
Tabel 21. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang	30
Tabel 22. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6	32
Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7	32
Tabel 24. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang	33
Tabel 25. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 7	34
Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8	34
Tabel 27. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 8 BPSPL Padang	35
Tabel 28. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Sipora	37
Tabel 29. Rekapitulasi Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi	46
Tabel 30. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 8	47
Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian IKU 9	48
Tabel 32. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 9 BPSPL Padang	49
Tabel 33. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Triwulan II 2024	49
Tabel 34. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 9	53
Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian IKU 10	53
Tabel 36. Realisasi Rincian Output Pendukung IKU 10	56
Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian IKU 11	56
Tabel 38. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 11 BPSPL Padang	57
Tabel 39. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi	57
Tabel 40. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 11	59
Tabel 41. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12	59
Tabel 42. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang	60
Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13	61
Tabel 44. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang	61
Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14	63
Tabel 46. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang	63
Tabel 47. Hasil Penilaian Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang	64
Tabel 48. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 14	65
Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15	66



Tabel 50. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang	66
Tabel 51. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 15	67
Tabel 52. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16	67
Tabel 53. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 16 BPSPL Padang	68
Tabel 54. Nilai AKIP BPSPL Padang Sementara.....	69
Tabel 55. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 16	69
Tabel 56. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17	70
Tabel 57. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 17 BPSPL Padang	70
Tabel 58. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18	72
Tabel 59. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 18 BPSPL Padang	72
Tabel 60. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19	73
Tabel 61. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga Triwulan II 2024	73
Tabel 62. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 19 BPSPL Padang	75
Tabel 63. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20	76
Tabel 64. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 20 BPSPL Padang	76
Tabel 65. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21	78
Tabel 66. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 21	80
Tabel 67. Kriteria Nilai Pengawasan Kearsipan Internal.....	80
Tabel 68. Perbandingan Capaian BPSPL Padang dengan Unit Kerja Sejenis.....	82
Tabel 69. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan II 2024.....	83

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSPL Padang secara proposional dan profesional berupaya mencapai hasil yang baik dengan mengutamakan transparansi dan keterbukaan pada setiap kegiatan dengan cara melaporkan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) yang disusun setiap triwulan. LKj Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Triwulan II 2024 merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban atas pencapaian dari tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan selama periode tersebut, sesuai dengan amanat yang tertuang dalam instruksi Presiden Republik Indonesia No.7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penyajiannya, laporan ini dilengkapi dengan hasil capaian target dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan BPSPL Padang yang berpedoman pada sasaran strategis yang diturunkan dalam bentuk Indikator Kinerja (IK). Adapun hasil capaian kinerja Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, dan anggaran pendukung kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan BPSPL Padang.

1.2 Tugas dan Fungsi

BPSPL Padang sebagai salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di bawah naungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan, memiliki peran dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) yang berorientasi menyukseskan rencana pembangunan nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang termaktub dalam prioritas nasional yaitu lingkungan hidup, penanggulangan bencana yang dilaksanakan melalui konservasi dan pemanfaatan lingkungan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil disertai penguasaan dan pengelolaan risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, fungsi dari Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir adalah:

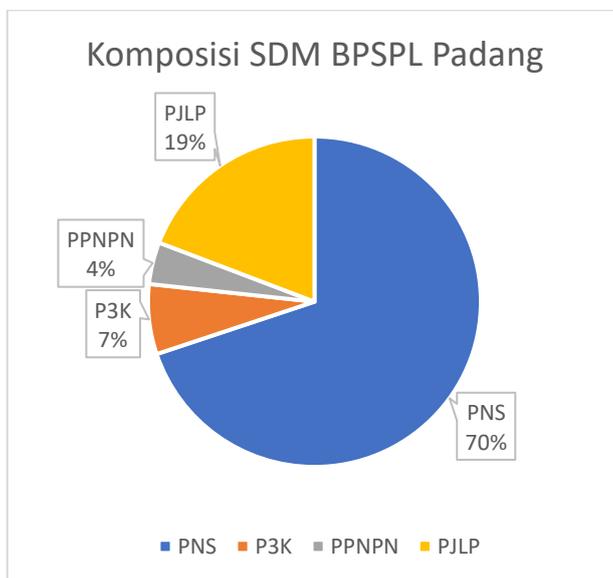
1. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
2. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
3. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
4. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetic ikan;
5. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
6. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
7. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
8. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
9. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

BPSPL Padang memiliki wilayah kerja meliputi tujuh (7) Provinsi se-Sumatera yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup 60 Kabupaten/Kota Pesisir se-Sumatera. Selain itu, BPSPL Padang juga memiliki kantor wilayah kerja/satuan kerja (Satker) dan gerai pelayanan di Medan, Tanjungpinang, Pekanbaru, Banda Aceh, Jambi, Palembang, dan Batam.



Gambar 1. Wilayah Kerja BPSPL Padang Tahun 2024

Total Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BPSPL Padang hingga triwulan II 2024 dalam menunjang pencapaian tujuan organisasi adalah 73 orang, yang terdiri dari 51 orang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), 3 orang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), dan 14 orang berstatus sebagai Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Lebih lanjut, mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tim Kerja lingkup BPSPL Padang terdiri dari empat tim, meliputi Perlindungan dan Pelestarian, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Pemanfaatan Ruang Laut, dan Dukungan Manajemen.



Gambar 2. Komposisi SDM BPSPL Padang



Gambar 3. Struktur Organisasi BPSPL Padang

1.3 Perkembangan Lingkungan Kerja Strategis

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecilnya yang sangat potensial. Indonesia memiliki *megabiodiversity*, yang mencakup keanekaragaman genetic, spesies, dan ekosistem. Kondisi tersebut memberikan beragam manfaat melalui penyediaan jasa ekosistem, baik penyediaan makanan dan obat-obatan, sebagai penyangga kehidupan ekosistem, serta memberikan beragam manfaat ekonomi jika dikelola secara bijak. Pengelolaan yang bertanggung jawab memberikan *multiplier effect* yang akan mengantarkan pada kondisi lingkungan pesisir dan pulau kecil yang optimal sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang berketahanan pangan, berketahanan iklim dan meningkatkan kesejahteraan.

Wilayah kerja BPSPL Padang memiliki karakteristik perairan yang khas. Di bagian barat, khas dengan ekosistem pesisir yang dipengaruhi oleh dinamika perairan Samudera Hindia, sedangkan di bagian timur, khas dengan beragam tipe ekosistem yang dipengaruhi oleh kondisi perairan Selat Malaka. Kondisi tersebut memberikan beragam potensi keanekaragaman hayati yang melimpah. Berikut adalah beberapa potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah kerja BPSPL Padang:

- 1) Perencanaan Ruang Laut
Terdapat 5 RZWP3K yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur dari total 7 provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang.
- 2) Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut
 - a. Terdapat luas kawasan konservasi perairan daerah sebesar 3.004.683,25 Ha di wilayah kerja BPSPL Padang yang perlu didorong pengelolannya secara optimum;
 - b. Letak Indonesia yang berada di kawasan segitiga terumbu karang dunia (*coral triangle*), menjadikan Indonesia dipertimbangkan sebagai pusat keanekaragaman terumbu karang dunia. Sebanyak sekitar 569 jenis karang yang termasuk dalam 82 genus karang dijumpai di Indonesia. Berdasarkan kebijakan satu peta (*one map policy*) yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011, dirilis bahwa luas terumbu karang di Indonesia berdasar analisis dari citra satelit adalah sekitar 2.517.858 Ha, dimana 19% atau sekitar 478.587 Ha diantaranya berada di Perairan Sumatera;
 - c. Terdapat 13 target kehati prioritas pengelolaan KKP di wilayah kerja BPSPL Padang meliputi: Penyu, Kuda Laut, Napoleon, Sidat, Teripang, Lola, Kima, Terubuk, Hiu, Pari dan mamalia laut (Paus, Dugong) serta Karang;
 - d. Keanekaragaman hayati endemik yang hanya dijumpai di selat Malaka, yaitu terubuk jenis *Tenualosa iliisha* yang salah satu habitat pentingnya ada di Labuhan Batu, dan jenis *Tenualosa macrura* yang ada di selat Bengkalis;
 - e. Keberadaan Penyu Belimbing di Betumonga yang merupakan salah satu jenis penyu langka di Wilayah Kerja BPSPL Padang;
 - f. Telah dilakukan upaya monitoring secara berkesinambungan melalui pendataan penyu belimbing di site betumonga (sejak tahun 2019), pendaratan Hiu dan Pari di Sibolga dan Aceh Selatan (sejak tahun 2019) serta Kuda Laut di Bintan (sejak tahun 2018);
 - g. Aksi bersama perlindungan keanekaragaman hayati laut melalui FKPP Sumbar dan Forum Pelestarian Terubuk Riau;
 - h. Pengembangan database penanganan respon cepat biota laut terdampar melalui website BPSPL Padang dengan alamat situs <https://kkp.go.id/djprl/ bpsplpadang> pada menu SIG;
 - i. Terdapat potensi kelompok penggerak konservasi dengan kegiatan berupa perlindungan jenis, kawasan dan ekosistem pesisir di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 40 kelompok.
 - j. Pangsa pasar internasional produk hiu pari non appendiks CITES meliputi beberapa negara antara lain Singapura, Malaysia, Thailand, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, China, Italia. Spanyol, hingga Meksiko.

- 3) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil
 - a. Potensi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) sejumlah 39 PPKT di wilayah kerja BPSPL Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017;
 - b. Potensi luasan ekosistem mangrove di wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 810.171 Ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, KLHK, tahun 2020, Indonesia memiliki areal seluas 3.329.219 Ha. 16,43% luasan mangrove nasional tersebut berada di wilayah kerja BPSPL Padang, atau seluas 547,022 Ha, yang tersebar di Provinsi Aceh (32.824 Ha), Provinsi Sumatera Utara (57.898 Ha), Provinsi Sumatera Barat (18.084 Ha), Provinsi Sumatera Selatan (158.845 Ha), Provinsi Jambi (10.082 Ha), Provinsi Riau (212.857 Ha), dan Kepulauan Riau (56.432 Ha). Provinsi Riau merupakan Provinsi yang memiliki luasan mangrove terluas di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 38,91%, sedangkan Provinsi terendah luasannya adalah Provinsi Jambi yang hanya sebesar 1,84%.
 - c. Terdapat potensi kelompok pegiat mangrove di pesisir wilayah kerja BPSPL Padang sejumlah 49 Kelompok.
- 4) Pemanfaatan Jasa Kelautan
 - a. Potensi petambak garam tradisional di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireun Provinsi Aceh;
 - b. Potensi distributor dan pengolah garam di Kab. Bireun yang telah berstandar nasional dengan jangkauan pasar regional;
 - c. Terdapat potensi jenis biota yang dapat dimanfaatkan sebagai produk biofarmakologi berupa rumput laut, kuda laut dan teripang;
 - d. Kawasan pesisir di Sibolga termasuk dala Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Sibolga dan sekitarnya yang dapat didukung pengembangannya melalui Desa Wisata

Seiring dengan perkembangannya, potensi yang dimiliki tersebut dapat menghasilkan tantangan dan permasalahan dalam pengelolaannya. Pada saat ini, BPSPL Padang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui berbagai program dan kegiatan. Sebagian tantangan tersebut adalah program dan kegiatan yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya dan sebagiannya lagi adalah tantangan terhadap dinamika kebijakan program pembangunan yang semakin kompleks. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1) Banyaknya kepentingan yang memanfaatkan ruang laut, wilayah pesisir dan pulau–pulau kecil sehingga terjadi tumpang tindih pemanfaatan sumberdaya di dalamnya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan yang kurang memperhatikan daya tampung dan daya dukungnya. Tarik menarik antar beragam kepentingan terhadap ruang laut, pesisir dan pulau–pulau kecil menyebabkan beberapa provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, menjadi terkendala dalam upaya pengesahan ranperda RZWP3K nya, yang diharapkan mampu menjadi alat pengendalian pemanfaatan potensi sumber daya laut, pesisir dan pulau–pulau kecil secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2015–2020, dari 7 Provinsi di wilayah kerja BPSPL Padang, 2 di antaranya masih belum dapat disahkan menjadi produk hukum sehingga perlu program akselerasi dan pendampingan yang lebih intensif, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, tantangan secara lebih spesifik, adalah penyelesaian potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang laut diselesaikan melalui Penyusunan rencana zonasi antara kawasan (RZ KAW), rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ-KSNT);
- 2) Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyebabkan perubahan tata Kelola terkait pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Salah satunya adalah amanat untuk mengintegrasikan RTRW dan RZWP3K menjadi satu produk hukum tata ruang sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan sumber daya laut, pesisir dan pulau–pulau kecil. Proses integrasi tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan melalui program dan kegiatan akselerasi dan pendampingan penyusunannya. Proses integrasi tersebut merupakan suatu terobosan penting dalam melihat ruang

perairan dan darat dalam satu persepektif integratif dan holistik. Namun demikian ada banyak penyesuaian substansi dan administrasi sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas, memenuhi kaidah keberlanjutan dan partisipasi masyarakat;

- 3) Pemanfaatan ruang laut dan potensi sumber daya di dalamnya perlu dikelola melalui mekanisme pengendalian dan pengawasan sehingga pemanfaatannya dapat dipastikan mengikuti koridor keberlanjutan dan kesesuaian dengan rencana tata ruang laut yang disusun. Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan program dan kegiatan operasionalisasi permohonan kesesuaian pemanfaatan ruang laut yang diwujudkan melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL);
- 4) Dalam rangka memenuhi Aichi Target yang memandatkan perlunya melakukan konservasi seluas 10% dari luas perairan, pesisir dan pulau kecil atau sekitar 32,5 juta Ha. Di wilayah kerja BPSPL Padang, kawasan konservasi perairan ada di semua Provinsi namun pengelolaannya belum efektif termasuk di dalamnya adalah upaya peningkatan status perlindungan kawasan konservasi yang baru pada status pencadangan dan belum ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana luasan kawasan konservasi yang akan dicapai dapat berjalan beriringan dengan efektivitas pengelolaannya sehingga keberadaan kawasan konservasi yang dikelola secara efektif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlanjutan sumber daya laut dan peningkatan kesejahteraan serta nilai ekonomi kawasan. Salah satu program dan kegiatan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yaitu mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- 5) Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau Appendix CITES belum optimal. KKP sebagai Otoritas Manajemen CITES perlu dilakukan penguatan dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Yang Dilindungi Dan/Atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendix *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*. Dalam implementasinya, diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk appendix CITES termasuk di dalamnya pengembangan ilmu dan teknologi. Tantangan selanjutnya adalah terkait adanya rencana pelimpahan kewenangan/managemen authorities untuk jenis ikan bersirip (pisces) dari KLHK kepada KKP. Terkait hal itu, maka UPT diharapkan mampu menyelenggarakan issue perdagangan jenis ikan yang sebelumnya dikelola oleh KLHK, dimana di dalamnya mencakup perijinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Salah satu dari jenis ikan tersebut adalah ikan Arwana, dimana komoditas tersebut termasuk banyak diperdagangkan di Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Selatan;
- 6) Wilayah kerja BPSPL Padang, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi, meliputi kuda laut, teripang, lola, kima, hiu-pari, mamalia laut, napoleon, dugong, penyu, sidat, terumbu karang, terubuk, ikan purba, dan beragam jenis kehati lainnya. Keberadaannya semakin terancam akibat semakin meningkatnya tekanan habitat di alam oleh aktivitas antropogenik meliputi over-eksploitasi, *bycatch*, *spesies invasive*, kerusakan habitat, dan lain sebagainya. Permasalahan ini mendorong perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengelolaan kehati agar dapat terjaga habitat dan keanekaragaman hayati di dalamnya sesuai dengan kerangka rencana aksi dari masing-masing keanekaragaman hayati prioritas pengelolaan. Kondisi tersebut diperparah dengan asih minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian biota laut yang dilindungi. Hal ini terus dilakukan kegiatan sosialisasi jenis ikan yang dilindungi dan/atau masuk dalam appendix CITES kepada masyarakat;

- 7) Meningkatnya dampak negatif adanya fenomena perubahan iklim menyebabkan permasalahan ketahanan pesisir, diantaranya adalah ancaman abrasi pantai yang dapat merusak ekosistem pesisir serta kerusakan ekosistem terumbu karang akibat adanya *coral bleaching*. Hal ini dilakukan melalui rehabilitasi pesisir dengan program dan kegiatan penanaman mangrove dan pembangunan pelindung pantai serta penguatan ketahanan sosial masyarakat pesisir melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan ekosistem mangrove. Program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi upaya mitigasi dan adaptasi terhadap adanya fenomena perubahan iklim di pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 8) Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, merupakan salah satu jalur transportasi laut yang cukup padat. Kondisi tersebut membawa dampak terjadinya peningkatan pencemaran pesisir dan laut dengan meningkatnya intensitas kejadian tumpahan minyak. Kondisi tersebut mengancam keberlanjutan keanekaragaman hayati dan habitatnya. Sehingga perlu adanya program dan kegiatan yang dapat menjawab tantangan dari permasalahan tersebut;
- 9) Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan, dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem untuk penguatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. BPSPL Padang telah diberikan mandat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penatakelolaan dan pendayagunaan PPKT agar menjadi objek dan asset pembangunan yang bernilai strategis untuk meningkatkan daya guna lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan negara. Dari 111 PPKT, 39 PPKT berada di wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu 7 PPKT di Provinsi Aceh, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Utara, 3 PPKT di Provinsi Sumatera Barat, 22 PPKT di Provinsi Kepri, dan 4 PPKT di Provinsi Riau.
- 10) pemanfaatan ekonomi kelautan seperti pengelolaan produksi garam yang belum optimal. Sehingga perlu dilakukan peningkatan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain itu pemanfaatan ekonomi kelautan lainnya seperti biofarmakologi laut dan wisata bahari perlu ditingkatkan kualitas pengelolaannya serta jasa kelautan terkait lainnya

Lebih lanjut, pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil tidak dapat dilepaskan dari perkembangan lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal, yang tercantum dalam analisis *strength, weakness, opportunities, threat* (SWOT) berikut ini.



Gambar 4. Analisis SWOT Lingkungan Strategis BPSPL Padang

1.4 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk menginformasikan capaian kinerja triwulan II pada tahun 2024. Adapun capaian kinerja triwulan II 2024 tersebut dibandingkan dengan penetapan kinerja tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Sistematika penyajian laporan sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum terkait BPSPL Padang beserta perkembangan lingkungan kerja strategis.
- Bab II Perencanaan Kinerja**, menyajikan uraian rencana strategis berisi visi dan misi organisasi serta perjanjian kinerja BPSPL Padang tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja**, menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisis- analisis pendukungnya.
- Bab IV Penutup**, menyajikan simpulan umum serta langkah-langkah strategis pada masa mendatang.
- Lampiran**, melampirkan data-data pendukung laporan.

II. Perencanaan Kinerja

2.1. Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Dalam upaya mendukung visi, misi, dan *grand strategy* KKP dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL), BPSPL Padang memiliki tugas-tugas yang dituangkan dalam kegiatan dan Indikator Kinerja (IK). Oleh karena itu, pelaksanaan Tugas dan kegiatan yang menjadi kewenangan BPSPL Padang berpedoman pada sasaran kegiatan yang diturunkan pada IK sebagai target yang akan dicapai selama periode tahun anggaran. Dalam perkembangannya, pada tahun 2024 ini terdapat sebelas (11) sasaran kegiatan dan 22 indikator kinerja yang dimandatkan kepada BPSPL Padang. Adapun sasaran kegiatan dan IK tersebut termuat dalam Perjanjian Kinerja BPSPL Padang 2024 yang disajikan dalam tabel berikut (secara lengkap ditampilkan dalam Lampiran 1).

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya nilai PNBP BPSPL Padang	1	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3	Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	4	Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	5	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6	Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencarian Baru (Kelompok)	1
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8	Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	1
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup BPSPL Padang	12	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)	93,76
		13	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	86

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		14 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	75
		15 Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	88
		16 Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	81
		17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18 Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
		20 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
		21 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
		22 Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	65

Pada tahun 2023 lalu, setelah melalui dinamika revisi Perjanjian Kinerja, terdapat enam belas indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja tahun 2023. Ditinjau dari komposisinya, pada tahun 2024 ini terdapat penambahan beberapa indikator kinerja baru. Penambahan indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

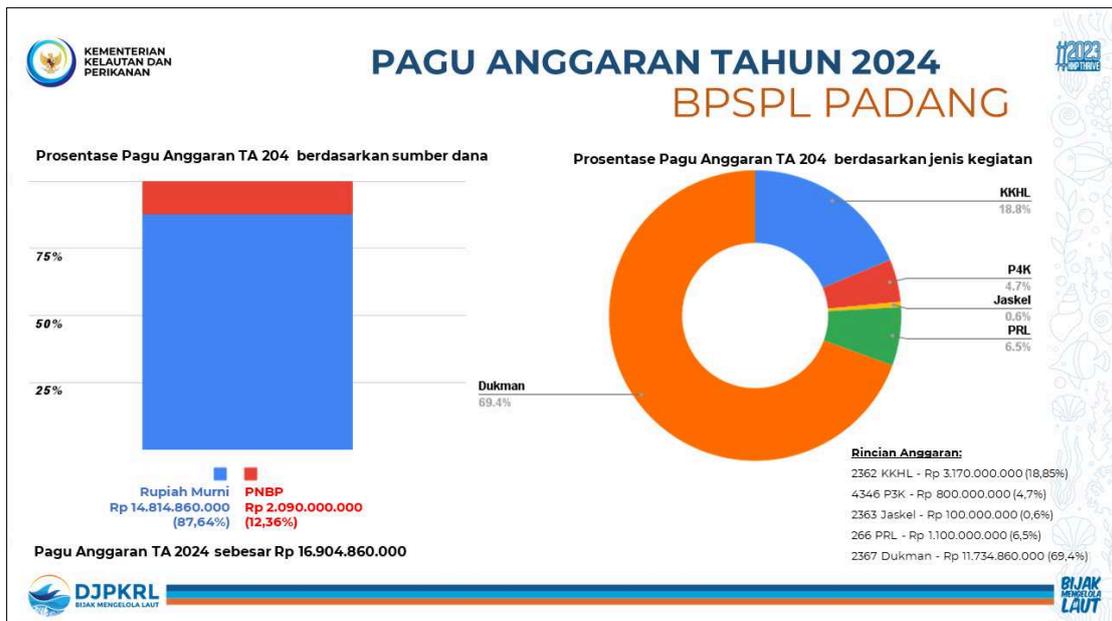
Tabel 2. Penambahan Indikator Kinerja Tahun 2024

Nomor	Indikator Kinerja	Keterangan
1	Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
2	Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	Indikator Kinerja yang terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 namun tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
3	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	Indikator Kinerja yang sempat terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 namun berakhir tidak diukur pada periode tersebut karena anggaran pendukungnya terblokir hingga akhir tahun
4	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023
5	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	Indikator Kinerja yang sempat terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 namun berakhir tidak diukur pada periode tersebut karena anggaran pendukungnya terblokir hingga akhir tahun
6	Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Indikator Kinerja baru yang tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja tahun 2023

2.2 Postur Anggaran 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target kinerja, pada tahun 2024 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2024 sebesar **Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan

Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).



Gambar 5. Komposisi Pagu Anggaran BPSPL Padang Tahun 2024

Saat pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 tanggal 24 November 2023, terdapat blokir anggaran senilai Rp659.800.000,00 pada tiga Klasifikasi Rincian Output (KRO). Dalam perkembangannya, telah dibuka blokir pada KRO [2367.CAN] Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi senilai Rp172.800.000,00 yang bersumber dari PNBP dalam pengesahan Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-4 tanggal 28 Maret 2024. Perkembangan tersebut menyisakan blokir pada dua KRO, yaitu [2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dan [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies karena memerlukan persetujuan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Lebih lanjut, dilaksanakan penelaahan usulan revisi buka blokir BPSPL Padang yang mengacu pada Surat a.n Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Pertanian, Kelautan, dan Kehutanan Nomor UND-83/AG.3/AG.31/2024 tanggal 19 Juni 2024. Hasil penelaahan tersebut menghasilkan disetujuinya usulan pembukaan blokir kedua KRO yang terdampak blokir dalam Rincian Kerja dan Anggaran revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024.

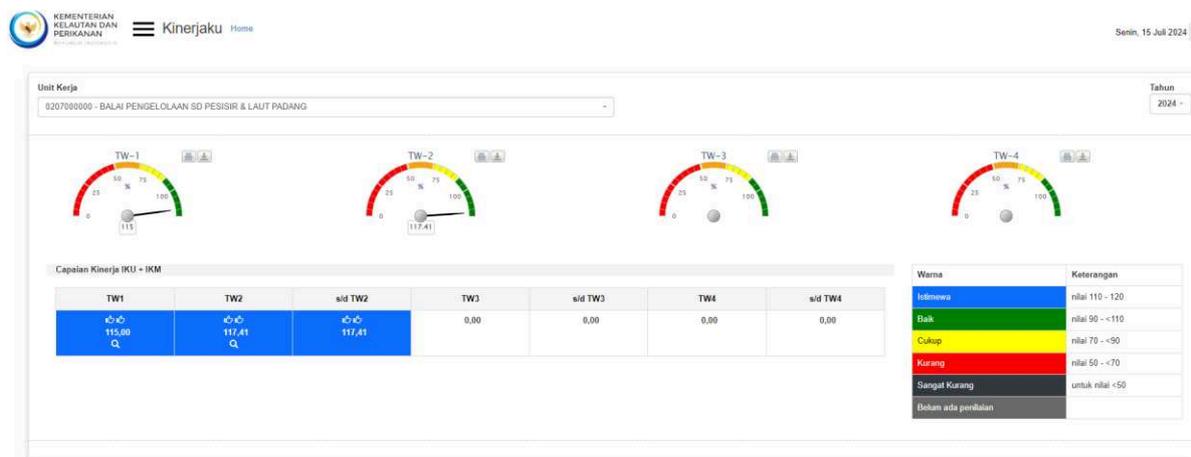
Tabel 3. Rincian Klasifikasi Rincian Output yang Sempat Terdampak Blokir

No	Klasifikasi Rincian Output	Total Blokir		Status
		Sumber Dana Rupiah Murni (Rp)	Sumber Dana PNBP (Rp)	
1	[2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem	100.000.000,00	100.000.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024
2	[2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies	-	172.800.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-7 tanggal 20 Juni 2024
3	[2367.CAN] Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	287.000.000,00	Buka blokir yang disahkan dalam Rincian Kerja dan Anggaran Revisi ke-4 tanggal 28 Maret 2024

III. Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPSPL Padang dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi dari masing-masing indikator kinerja. Adapun pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui laman <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang periode triwulan II 2024 adalah **117,41 (kategori istimewa)**.



Gambar 6. NKO BPSPL Padang Triwulan II 2024

Pada tahun 2023 ini, Perjanjian Kinerja BPSPL Padang terdiri dari sebelas (11) sasaran strategis dan 22 indikator kinerja dengan periode capaian triwulanan, semesteran, dan tahunan. Sementara itu, rincian target dan capaian kinerja BPSPL Padang pada triwulan II 2024 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Rincian Capaian Kinerja BPSPL Padang pada Triwulan II 2024

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET TW II 2024	CAPAIAN TW II 2024	PERSENTASE CAPAIAN
1	Meningkatnya nilai PNBSP BPSPL Padang	1 Nilai PNBSP BPSPL Padang (Rp.000)	Tahunan	-	-	-
2	Meningkatnya tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2 Tenaga kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	Tahunan	-	-	-
3	Terselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian ruang laut di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah kerja BPSPL Padang	3 Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	Tahunan	-	-	-
4	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan Kawasan konservasi di tingkat daerah di wilayah kerja BPSPL Padang	4 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Daerah)	Tahunan	-	-	-



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET TW II 2024	CAPAIAN TW II 2024	PERSENTASE CAPAIAN
5	Meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerja sama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja BPSPL Padang	5 Kerjasama konservasi yang diinisiasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	Tahunan	-	-	-
6	Meningkatnya partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam mendukung konservasi di wilayah kerja BPSPL Padang	6 Bantuan pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di wilayah kerja BPSPL Padang (Kelompok)	Triwulanan	1	2	200 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku
		7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)*	Tahunan	-	-	-
7	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan di wilayah kerja BPSPL Padang	8 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang (Jenis)	Tahunan	-	-	-
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan di wilayah kerja BPSPL Padang	9 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	Tahunan	-	-	-
9	Terfasilitasinya pemanfaatan Air Laut Selain Energi di wilayah kerja BPSPL Padang	10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang	Tahunan	-	-	-
10	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	Tahunan	-	-	-
11	Tata Kelola Pemerintahan yang	12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran	Semesteran	83	99,27	119,60



No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PERIODE PENGUKURAN	TARGET TW II 2024	CAPAIAN TW II 2024	PERSENTASE CAPAIAN
	baik lingkup BPSPL Padang	(IKPA) lingkup BPSPL Padang (nilai)				
13		Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	-	-	-
14		Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK di wilayah kerja BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	-	-	-
15		Indeks profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang (indeks)	Semesteran	83	90,92	109,54
16		Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (nilai)	Tahunan	-	-	-
17		Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	Triwulanan	2	2	100
18		Persentase unit kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Triwulanan	94	133,33	141,84 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku
19		Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BPSPL Padang yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	Triwulanan	80	100	125 atau 120 berdasarkan aplikasi Kinerjaaku
20		Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	-	-	-
21		Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	Tahunan	-	-	-
22		Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (Nilai)	Tahunan	-	-	-

IKU. 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)

Penerimaan Negara Bukan Pajak BPSPL Padang adalah seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, meliputi Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya, pengelolaan BMN, denda dan lain-lain.

$$PNBP_{BPSPL\ Padang} = PNBP_{Layanan} + PNBP_{BMN} + PNBP_{Lainnya}$$

$PNBP_{Layanan}$: Nilai PNBP yang berasal dari Pendapatan Perizinan Lainnya dan Jasa Kelautan dan Perikanan.

$PNBP_{BMN}$: Nilai PNBP yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

$PNBP_{Lainnya}$: Nilai PNBP yang berasal dari Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 1 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. Perbandingan Target dan Capaian IKU 1

IKU 1. Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)				
Realisasi Triwulan II 2023	Triwulan II 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh perolehan PNBP yang berasal dari pendapatan perizinan, pengelolaan Barang Milik Negara, dan Tuntutan Ganti Rugi dan Denda yang tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator nilai PNBP tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai PNBP juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan penggunaan aplikasi dan kompetensi tim pengelola PNBP. Aplikasi yang digunakan dalam PNBP layanan, yaitu e-SAJI dan SIMPONI, dapat mempermudah proses pemungutan PNBP dan mempersingkat waktu pelayanan. Namun, ada kalanya aplikasi-aplikasi tersebut mengalami gangguan atau *maintenance*. Maka dari itu, menghadapi kemungkinan tersebut, tim pelayanan dan pengelola PNBP BPSPL Padang mengantisipasi risiko tersebut dengan menyiapkan format pencatatan dan penghitungan PNBP secara manual.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi yang didukung oleh penggunaan aplikasi e-SAJI, e-Sultan's, dan SIMPONI. Aplikasi e-SAJI merupakan aplikasi untuk memproses layanan perizinan rekomendasi dan Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) untuk jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES. Sementara itu, e-Sultan's merupakan platform yang dikelola oleh BPSPL Padang untuk optimalisasi layanan yang belum terakomodir pada aplikasi e-SAJI, yaitu permohonan Berita Acara Verifikasi Lapang (BAVL) Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI), permohonan pemeriksaan keberangkatan/kedatangan SAJI, permohonan Berita Acara Pemeriksaan Stok, dan permohonan Berita Acara Kematian Ikan Arwana. Terakhir, aplikasi SIMPONI juga mendukung proses layanan dalam penerbitan billing PNBP. Adanya aplikasi tersebut dapat menunjang pelaksanaan layanan hingga pemungutan PNBP secara tersistem.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Perolehan PNBP hingga Triwulan II 2024

Realisasi pendapatan PNBP Triwulan II 2024 disajikan pada gambar berikut.

NO		Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
			MPN		BI				
			Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	325.215	0	0	1.964.298	0	2.289.513	
2	425259 Pendapatan Perizinan Lainnya	0	134.865.000	0	0	0	0	134.865.000	
3	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	425.500	0	0	0	0	425.500	
4	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	187.832.107	0	0	0	0	187.832.107	
5	425629 Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	319.205.838	0	0	0	0	319.205.838	
GRAND TOTAL		0	642.653.660	0	0	1.964.298	0	644.617.958	

Gambar 7. Realisasi Pendapatan PNBP BPSPL Padang Triwulan II 2024
 Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Juli 2024

2. Penggunaan Dana PNBP di BPSPL Padang

Pada tahun 2024, terdapat proporsi pagu anggaran BPSPL Padang yang bersumber dari PNBP sebesar Rp2.090.000.000,00 atau 12,36% dari keseluruhan pagu anggaran. Berikut adalah rincian anggaran yang bersumber dari PNBP beserta realisasinya. Realisasi anggaran yang bersumber dari PNBP hingga triwulan II telah mencapai 34,03%.

NO	(Kode) Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	7.230.000.000	7.204.110.000	380.750.000	0	0	0	0	0	0	14.814.860.000
		REALISASI	4.102.513.937 (56.74%)	3.505.392.396 (48.66%)	377.863.643 (99.24%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.985.769.976 (53.90%)
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	1.917.200.000	172.800.000	0	0	0	0	0	0	2.090.000.000
		REALISASI	0.00%	711.165.719 (37.09%)	(0.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	711.165.719 (34.03%)
GRAND TOTAL		PAGU	7.230.000.000	9.121.310.000	553.550.000	0	0	0	0	0	0	16.904.860.000
		REALISASI	4.102.513.937 (56.74%)	4.216.558.115 (46.23%)	377.863.643 (68.26%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	8.696.935.695 (51.45%)
		SISA	3.127.486.063	4.904.751.885	175.686.357	0	0	0	0	0	0	8.207.924.305

Gambar 8. Realisasi Penggunaan Dana PNBP Hingga Triwulan II 2024 Lingkup BPSPL Padang

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 1 didukung dengan kegiatan pelayanan peredaran jenis yang memiliki alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 1

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	864.850.000,00	332.839.213,00	38,5
Total		864.850.000,00	332.839.213,00	38,5

Realisasi anggaran komponen [2362.REB.002.052] adalah 38,5% yang digunakan untuk perjalanan pemeriksaan, verifikasi lapangan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha pemanfaat jenis ikan.

IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat di Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun nonfisik. Tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut oleh Balai pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang.

$$TK_{BPSPL\ Padang} = TK_{Lokasi\ 1} + TK_{Lokasi\ 2} + TK_{Lokasi\ 3} + TK_{Lokasi\ 4}$$

Keterangan:

$TK_{BPSPL\ Padang}$ = Jumlah tenaga kerja BPSPL Padang

$TK_{Lokasi\ 1}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 1.

$TK_{Lokasi\ 2}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 2.

$TK_{Lokasi\ 3}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 3.

$TK_{Lokasi\ 4}$ = Jumlah tenaga kerja dalam Gerakan nasional bulan cinta laut di Lokasi 4.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 2 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

IKU. 2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Orang)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini karena ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh keterlibatan nelayan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan II 2023 dan triwulan II 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh partisipasi aktif nelayan dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Pada tahun 2024, Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut dilaksanakan di empat lokasi wilayah kerja BPSPL Padang, yaitu Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Hingga triwulan II, BPSPL Padang telah melaksanakan sosialisasi, penimbangan sampah dan bimbingan teknis di masing-masing lokasi. Untuk mendorong partisipasi aktif nelayan selama rangkaian kegiatan, BPSPL Padang senantiasa berkoordinasi dengan penyuluh pendamping setempat.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat selama pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terdapat pada pelibatan mitra stakeholder terkait selama penyelenggaraan kegiatan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh pelaksanaan rangkaian Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Berdasarkan hasil identifikasi calon lokasi, disepakati bahwa lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang adalah Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Berikut adalah rincian jumlah nelayan yang terverifikasi dan tervalidasi di masing-masing lokasi.

Tabel 7. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi

No	Lokasi	Jumlah Nelayan yang Tervalidasi (Orang)
1	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	93
2	Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	87
3	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	73
4	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara	70
Total		323

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 2 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [4346.QDD.001] Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 2

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000,00	393.371.240,00	49,2
Total		800.000.000,00	393.371.240,00	49,2

IKU. 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 35, bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui: (a) ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; (b) pemberian insentif dan disinsentif; dan (c) pengenaan sanksi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut melalui: 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), (2) Persetujuan KKPR;
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 113 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan/atau wilayah yurisdiksi secara menetap di sebagian ruang laut wajib memiliki KKPR.

IKU ini tercapai dengan menginventarisasi dan menjumlahkan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi, monitoring/identifikasi pemanfaatan ruang laut yang eksisting, dan/ atau Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 3 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9. Perbandingan Target dan Capaian IKU 3

IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan. Capaian IKU ini didukung oleh kegiatan identifikasi/verifikasi, sosialisasi perizinan pemanfaatan ruang laut, penilaian teknis, penilaian lapangan, dan monitoring perizinan pemanfaatan ruang laut.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 10. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 3 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah perizinan lokasi di wilayah perairan pesisir dan laut	10	12	14	16	18	34 Provinsi
	Jumlah lokasi yang dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah	12	27	26	40	46	34 Provinsi

Dalam hal ini, indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh kelengkapan data dan informasi yang diperoleh dari lapangan dan kooperasi dari pelaku usaha. Hingga triwulan II, BPSPL Padang telah melaksanakan penilaian teknis, penilaian lapangan, asistensi, dan pengendalian dalam lingkup perizinan pemanfaatan ruang laut. Di samping itu, pedoman teknis terkait kegiatan ini juga telah diterbitkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut pada tanggal 4 September 2023 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan mempedomani ketentuan dalam pedoman tersebut dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang laut.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat untuk mendampingi identifikasi ataupun verifikasi lapangan. Selain itu, efisiensi juga didukung dengan penggunaan aplikasi zoom sebagai media dalam pelaksanaan penilaian teknis permohonan pemanfaatan ruang laut.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh serangkaian kegiatan berikut.

a. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut

BPSPL Padang telah melaksanakan sosialisasi pemanfaatan ruang laut pada triwulan II 2024. Informasi sosialisasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi berikut.

KEGIATAN SOSIALISASI YANG SUDAH DILAKSANAKAN BPSPL PADANG 7

SOSIALISASI PKKPRL

LOKASI	JUMLAH PESERTA
<ul style="list-style-type: none"> KABUPATEN KARIMUN KOTA SABANG KOTA BATAM 	<ul style="list-style-type: none"> 40 OFFLINE DAN PEMBUKAAN GERAI PELAYANAN SOSIALISASI TANGGAL 12 JUNI 2024 SEBAGAI NARASUMBER TANGGAL 4 JULI 2024 SEBAGAI NARASUMBER (SOSIALISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LAUT) PELAKSANAAN TANGGAL 14 MEI 2024

SOSIALISASI ALSE

LOKASI	JUMLAH PESERTA
<ul style="list-style-type: none"> KOTA DUMAI 	<ul style="list-style-type: none"> 40 OFFLINE DAN 50 ONLINE PEMBUKAAN GERAI PELAYANAN PELAKSANAAN SOSIALISASI TANGGAL 21 MEI 2024

SOSIALISASI PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN PULAU PULAU KECIL

LOKASI : KAB MENTAWAI PROV. SUMATERA BARAT PESERTA 50 PESERTA OFFLINE TANGGAL PELAKSANAAN 5 JUNI 2024

Gambar 9. Pelaksanaan Sosialisasi Pemanfaatan Ruang Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang

b. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Hingga triwulan II 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan identifikasi pemanfaatan ruang laut di tiga provinsi. Adapun identifikasi ini dilakukan terhadap pelaku usaha pemanfaat ruang laut yang belum memiliki PKKPRL. Rekapitulasi identifikasi pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.

CAPAIAN IDENTIFIKASI PEMANFAATAN RUANG LAUT WILKER BPSPL PADANG 3

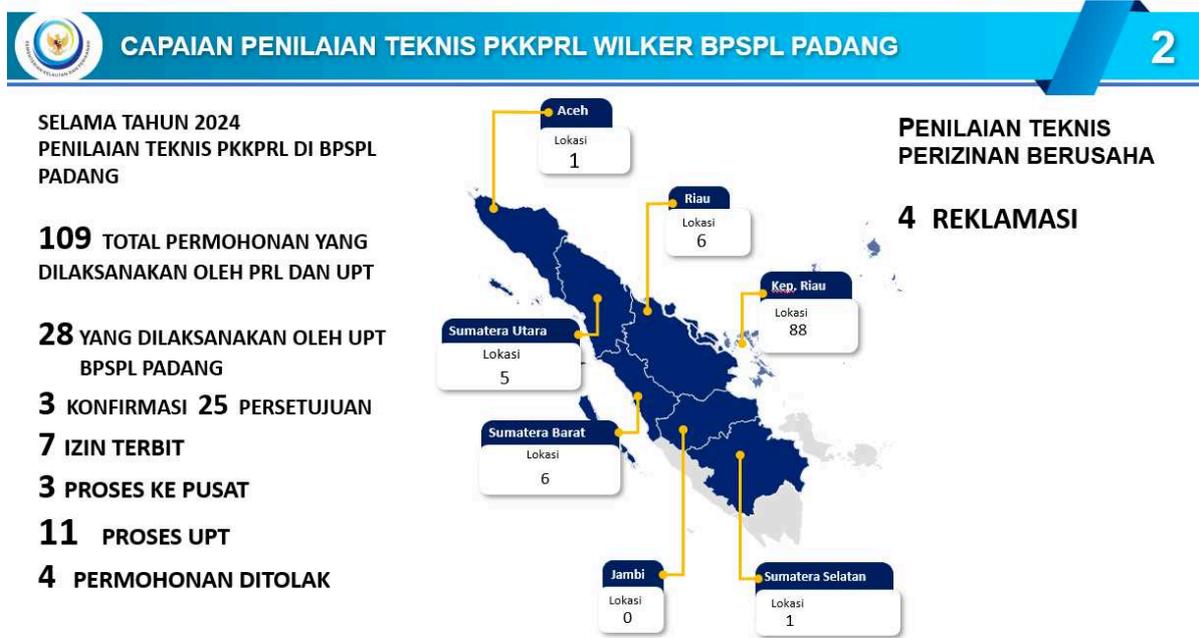


Gambar 10. Rekapitulasi Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut Hingga Triwulan II 2024

c. Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut

Penilaian teknis merupakan salah satu tahapan dalam pemrosesan izin PKKPRL yang dimohonkan oleh pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan BPSPL Padang berperan sebagai

penyelenggara penilaian teknis. Rekapitulasi verifikasi teknis perizinan kesesuaian ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang hingga triwulan II 2024 disajikan dalam ilustrasi di bawah ini.



Gambar 11. Rekapitulasi Penilaian Teknis Perizinan Kesesuaian Ruang Laut Hingga Triwulan II 2024

d. Verifikasi Lapangan

Verifikasi lapangan merupakan tahapan lanjutan dalam pemrosesan izin PKKPRIL setelah penilaian teknis ketika terdapat hal-hal yang perlu ditinjau kembali di lapangan. Berikut adalah rincian kegiatan verifikasi lapangan PKKPRIL yang BPSPL Padang laksanakan hingga triwulan II 2024.



Tabel 11. Verifikasi Lapangan KPRIL di Wilayah Kerja BPSPL Padang Triwulan II 2024

d. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Pengendalian pemanfaatan ruang laut dilakukan terhadap subjek hukum yang telah mengantongi izin PKKPR. Hingga triwulan II 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang laut terhadap 19 subjek hukum yang telah mengantongi izin PKKPR di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatra Barat.

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2366.PBT] Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKU 3

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2366.PBT.009] Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000	369.901.163,00	33,6
Total		1.100.000.000	369.901.163,00	33,6

Realisasi anggaran Rincian Output [2366.PBT.009] adalah 33,6%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan verifikasi dan monitoring pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja BPSPL Padang. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp600.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp500.000.000,00.

IKU. 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)

Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil adalah Provinsi yang didampingi penyusunan percepatan usulan penetapan konservasi dapat melalui pendampingan penyusunan rencana zonasi, pendampingan penyusunan rencana pengelolaan, atau pendampingan lain sesuai dengan kondisi Kawasan Konservasi. Dasar hukum yang dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Adapun pencapaian IKU ini diperoleh dengan cara menginventarisasi dan menjumlahkan daerah di wilayah kerja BPSPL Padang yang didampingi dalam proses percepatan usulan penetapan Kawasan konservasinya.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 4 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 13. Perbandingan Target dan Capaian IKU 4

IKU 4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya periode triwulan II 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada tahun 2023 dan 2024, IKU ini memiliki target tahunan sehingga tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 14. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 4 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil baru (nasional dan daerah) yang ditetapkan	Luas kawasan konservasi baru (ha)	700000	800000	900000	900000	900000	9 Provinsi

Dalam hal ini, indikator kinerja Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung terbesar dalam upaya pencapaian IKU 4 adalah akselerasi pemerintah daerah dalam memproses pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan daerah. Dalam perkembangannya, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah perihal tahapan-tahapan pendampingan pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah yang dapat didampingi oleh BPSPL Padang. Berdasarkan koordinasi tersebut, Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan dana dekonsentrasi untuk pengusulan penetapan Kawasan Konservasi Daerah sehingga memerlukan koordinasi lanjutan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada upaya koordinasi yang dilakukan secara jarak jauh dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga dilakukan untuk mendukung efisiensi.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini, BPSPL Padang telah melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang berpotensi dalam pengusulan penetapan kawasan konservasi perairan daerah. Secara umum, koordinasi tersebut menghasilkan informasi bahwa dana dekonsentrasi untuk pengusulan penetapan kawasan konservasi daerah pada Pemerintah Daerah belum dapat digunakan sehingga belum dapat ditentukan tahapan pendampingan yang akan melibatkan BPSPL Padang. Dalam hal ini, BPSPL

Padang perlu melaksanakan koordinasi lanjutan untuk membahas tahapan-tahapan pengurusan penetapan kawasan konservasi daerah yang dapat didukung oleh BPSPL Padang.

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.UBA] Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah dengan Rincian Output (RO) [2362.UBA.001] Pemerintah daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 4

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.UBA.001.051] Fasilitasi usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	150.000.000,00	5.593.707,00	3,7
Total		150.000.000,00	5.593.707,00	3,7

Realisasi anggaran rincian output [2362.UBA.001] adalah 3,7%.

IKU. 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)

Kegiatan inisiasi penyusunan draft Kerjasama, jejaring dan/atau kemitraan konservasi yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang merujuk pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih Lembaga/badan/ organisasi untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerjasama dapat dilakukan dengan kementerian dan Lembaga pemerintah non kementerian. Pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha/ industri/ perusahaan, dan organisasi kemasyarakatan.

Capaian indikator ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan draft kerja sama yang disusun/difasilitasi penyusunannya di wilayah kerja BPSPL Padang untuk mendukung kegiatan konservasi dan keanekaragaman hayati laut dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon 1.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian Target IKU 5 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 16. Perbandingan Target dan Capaian IKU 5

IKU 5. Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan II 2023 dan triwulan II 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 17. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 5 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi dan Kerjasama Konservasi yang mendukung Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	5	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Kerjasama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

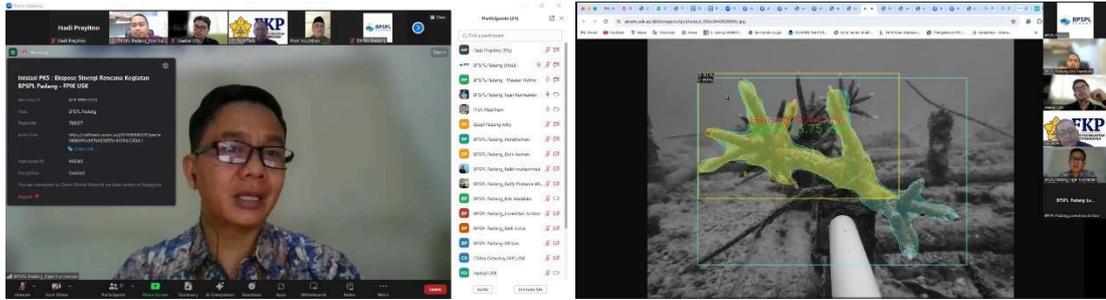
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan hasil analisis, pencapaian IKU ini didukung oleh koordinasi dengan calon mitra, dalam hal ini adalah Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala. Hingga triwulan I, BPSPL Padang telah melaksanakan dua kali pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala secara daring melalui aplikasi Zoom. Dengan dilaksanakan koordinasi berbasis daring, masing-masing pihak dapat mengikuti pembahasan lebih fleksibel. Maka dari itu, pencapaian IKU ini sangat terbantu dengan penggunaan aplikasi Zoom yang dapat memfasilitasi pertemuan berbasis daring.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom dalam pembahasan Perjanjian Kerja Sama secara daring dengan Universitas Syiah Kuala. Selain itu, pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat juga mendukung efisiensi penggunaan sumber daya.

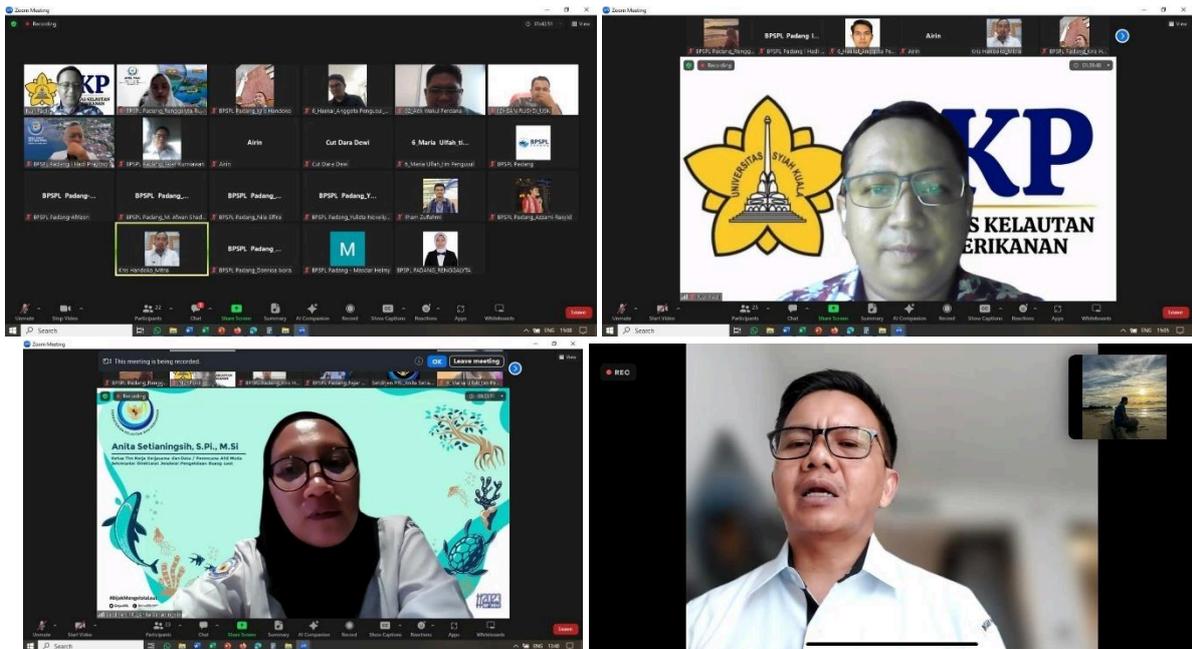
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh kegiatan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) BPSPL Padang dengan Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala (FKP USK) Tahun 2024-2027 yang telah dilaksanakan pada 25 Januari 2024 dan 2 Februari 2024 secara daring. Hingga pembahasan terakhir, draft Perjanjian Kerja Sama tersebut telah mengakomodir empat ruang lingkup, yaitu penguatan kapasitas SDM, pelestarian dan perlindungan biota laut dilindungi dan/atau terancam punah, pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kolaborasi padanan dana.



Gambar 12. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama FKP USK

Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama BPSPL Padang dengan Universitas Syiah Kuala bersama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada 26 Juni 2024. Kemudian, Draft Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut melalui Surat Kepala BPSPL Padang Nomor B.1553/BPSPL.1/TU.210/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.



Gambar 13. Dokumentasi Pembahasan Draft PKS Bersama Tim Sekretariat DJPKRL

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung oleh alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.PEC] Kerja Sama. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 18. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 5

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.PEC.001] Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000,00	5.725.000,00	8,2%
Total		70.000.000,00	5.725.000,00	8,2%

Realisasi anggaran pada KRO [2362.PEC] adalah 8,2%.

IKU. 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)

Bantuan konservasi merupakan bantuan penyediaan sarana dan prasarana konservasi yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan/atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, diberikan kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan, pengawasan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan dan keanekaragaman hayati laut secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 71 Tahun 2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2024. Adapun pencapaian IKU ini dihitung dari jumlah kelompok konservasi yang telah diberikan bantuan sesuai petunjuk teknis tersebut.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 6 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 19. Perbandingan Target dan Capaian IKU 6

IKU 6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
2	1	2	200 atau 120 menurut SAPK Kinerjaaku	-

Hingga triwulan II 2024, BPSPL Padang telah menyalurkan bantuan konservasi kepada kelompok masyarakat sebagaimana berikut.

Tabel 20. Penerima Bantuan Konservasi Hingga Triwulan II 2024

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nilai Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Item Bantuan
1	Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang	Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	Rp100.910.070,00	B.1045/BPSPL.1/PRL.440/V/2024 tanggal 4 Mei 2024	1. Mesin tempel: 1 Unit, 2. Genset V-Gen 3000 Watt: 1 Unit, 3. Papan Nama: 1 Unit, 4. WC Portable: 1 Unit, 5. Senter Kepala: 3 Unit, 6. Pelampung: 10 Unit, 7. Tenda: 1 Unit, 8. Kamera Olympus TG-6: 1 Unit, 9. Printer: 1 Unit.
2	Kelompok Kawasan	Desa Carocok Anau	Rp98.670.000,00	B.1451/BPSPL.1/PRL.440/VI/2024 tanggal 9 Juni 2024	1. Kamera Underwater TG-7 +

No	Nama Kelompok	Lokasi	Nilai Bantuan	Nomor dan Tanggal BAST	Item Bantuan
	Mandeh Blue Diving	Ampang Pulau, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat			Housing PT-059: 1 Set, 2. BCD Cressi Patrol: 2 Set, 3. Diving Set 2 Regulator Cressi MC9 XS Compact Pro: 2 Set, 4. Tabung Scuba Amscud 80 Cuft: 2 Set, 5. Mask Cressi Perla: 2 Set, 6. Snorkel Cressi Mexico: 2 Set, 7. Long Wetsuit Cressi Fast 3 mm: 2 Set, 8. Fin OH Cressi Thor: 2 Set, 9. Long Boot Cressi Patriot 5 mm: 2 Set.

Data dukung:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PaHoP4_CYIOs_ByWAru0EKj1wyOGdIUE

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada triwulan II 2023, BPSPL Padang telah menyalurkan bantuan konservasi kepada 2 kelompok, yaitu Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tanggal 30 Maret 2023 dan Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 21 Juni 2023. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian antara triwulan II 2023-2024 karena memiliki realisasi yang sama.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada triwulan II 2024, BPSPL Padang telah mencapai dua kelompok dari target tiga kelompok yang disalurkan bantuan konservasi. Maka dari itu, persentase pemenuhan target tahunan telah mencapai 66,67%.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 21. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan dilakukannya identifikasi calon kelompok penerima bantuan yang menyeluruh sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi. Tim pelaksana juga telah menyiapkan form seleksi dalam rangka memperoleh kelompok yang benar-benar sesuai. Melalui tahapan identifikasi, tim BPSPL Padang dapat memahami lingkup kegiatan yang diusung oleh kelompok secara menyeluruh hingga mengidentifikasi kebutuhan sarana/prasarana yang diajukan kelompok. Selain itu, tahapan identifikasi serta verifikasi yang menyeluruh juga dapat menghasilkan kelompok yang benar-benar sesuai dengan persyaratan yang dimandatkan dalam Petunjuk Teknis. Jika kelompok yang terpilih sebagai penerima bantuan tersebut betul-betul layak dan sesuai, diharapkan bantuan pun dapat dimanfaatkan dan mendukung pengembangan upaya konservasi kelompok di wilayahnya. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan KOMPAK, tahapan pengadaan barang jasa merupakan tahapan krusial yang dapat mengancam keberhasilan kegiatan secara tepat waktu. Untuk ke depannya, tim dapat mengupayakan pencegahan permasalahan dalam tahapan pengadaan barang dan jasa dengan melakukan pemantauan secara menyeluruh dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat pada setiap tahapan penyaluran bantuan konservasi. Hal tersebut mendukung efisiensi anggaran dan waktu yang dibutuhkan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU ini dapat ditunjang oleh kegiatan koordinasi dan pelaporan progress perkembangan penyaluran bantuan dengan Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan dan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Pelaporan yang tertib dan sesuai dapat mendukung aspek akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.

Hingga triwulan II 2024, kegiatan pendukung IKU 6 antara lain sebagai berikut.

a. Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

Dalam rangka penyaluran bantuan konservasi, BPSPL Padang melaksanakan verifikasi usulan bantuan terhadap Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang di Kabupaten Pesisir Selatan pada Jumat, 23 Februari 2024.

Berdasarkan hasil verifikasi, dokumen persyaratan administrasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang telah lengkap dan memenuhi syarat. Namun demikian, terdapat penyesuaian usulan bantuan yang

disampaikan karena menyesuaikan dengan Petunjuk Teknis dan aktivitas kelompok. Usulan bantuan yang disepakati adalah mesin tempel, senter infrared, kamera, generator listrik, panel surya, pelampung, laptop, printer, tenda, dan plang nama. Usulan ini akan menjadi acuan untuk proses selanjutnya.



Gambar 14. Dokumentasi Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

b. Penetapan Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024

Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang yang beralamat di Desa Sungai Pinang, Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.814/BPSPL.1/PRL.440/IV2024.

c. Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

Serah terima bantuan konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang diselenggarakan di Pandan View Mandeh Resort and Resto, Pesisir Selatan pada Selasa, 14 Mei 2024.



Gambar 15. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Rimba Peduli Sungai Pinang

d. Verifikasi Usulan Bantuan Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

Verifikasi usulan bantuan konservasi Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving dilaksanakan pada 9 Mei 2024. Berdasarkan hasil verifikasi, usulan bantuan yang disepakati adalah kamera bawah air, regulator, Buoyancy Compensator Device (BCD), tabung SCUBA, masker, snorkel, wetsuit, fin open heel, dan long boot.

e. Penetapan Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving sebagai Penerima Bantuan Konservasi Tahun 2024

Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving yang beralamat di Desa Cerocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pesisir Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan konservasi tahun 2024 melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Nomor B.1219/BPSPL.1/PRL.440/V2024.

f. Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

Serah terima bantuan konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving dilaksanakan di Pesisir Selatan pada Senin, 3 Juni 2024.



Gambar 16. Dokumentasi Serah Terima Bantuan Konservasi kepada Kelompok Kawasan Mandeh Blue Diving

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 6 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 22. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 6

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.051] Pemberian Bantuan KOMPAK	363.950.000,00	219.895.820,00	60,4
Total		363.950.000,00	219.895.820,00	60,4

Realisasi anggaran komponen [2362.QEH.001.051] adalah 60,4%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan identifikasi dan verifikasi kelompok penerima bantuan.

IKU. 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)

Kelompok masyarakat di kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru adalah kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan kelompok masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang difasilitasi pengembangan mata pencaharian baru di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 7 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 23. Perbandingan Target dan Capaian IKU 7

IKU 7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)				
Realisasi		Triwulan II 2024		
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya periode triwulan II 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU 4 karena ditargetkan pada periode tahunan. Anggaran pendukung kegiatan ini sempat mengalami blokir. Namun demikian, dalam perkembangannya blokir tersebut telah dibuka yang disertai dengan perubahan Klasifikasi Rincian Output pendukung kegiatan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023-2024. Pada tahun 2023, IKU ini tidak digunakan dalam pengukuran kinerja karena anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 24. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 6 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Jejaring, Kemitraan/Kerjasama, dan Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring kemitraan konservasi yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati laut	20	5	5	5	5	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Anggaran pendukung kegiatan ini sempat terdampak blokir sehingga belum terdapat realisasi kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini. Adapun blokir tersebut telah terbuka pada Juni 2024 sehingga kegiatan pendukung IKU ini akan mulai dilaksanakan pada Juli 2024. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pun belum dapat dilakukan pada indikator ini karena tahapan kegiatannya belum terlaksana.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya blokir anggaran pendukung selama periode Januari hingga Juni terhadap anggaran pendukung kegiatan ini mempengaruhi pergerakan tim dalam memulai pelaksanaan kegiatan. Hingga triwulan II 2024, belum terdapat realisasi kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 7 awalnya didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REA] Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem dengan Rincian Output (RO) [2362.REA.003] Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan. Namun demikian, KRO tersebut mengalami blokir. Dalam perkembangannya, terjadi pembukaan blokir dan kegiatan ini memiliki KRO dan RO pendukung yang berbeda. Saat ini IKU 7 didukung oleh KRO [2362.SCC] Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan dengan RO

[2362.SCC.002] Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 25. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 7

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.SCC.002.051] Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi	200.000.000,00	-	-
Total		200.000.000,00	-	-

Realisasi anggaran komponen [2362.SCC.002.051] adalah 0% karena sempat terkendala oleh blokir anggaran. Komponen ini memiliki pagu senilai Rp200.000.000,00 yang bersumber dari rupiah murni senilai Rp100.000.000,00 dan bersumber dari PNBP senilai Rp100.000.000,00.

IKU. 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi, dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja kerja BPSPL Padang adalah Jenis ikan yang diintervensi perlindungan/pelestariannya melalui pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat/pemulihan populasi, atau penanganan biota dilindungi untuk kesinambungan keanekaragaman hayati perairan. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi di wilayah kerja BPSPL Padang.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian jenis ikan terancam punah yang dilaksanakan, melalui:

- Pendataan jenis ikan dilindungi/terancam punah dengan target jenis: sidat, teripang, penyu, karang, ikan belida, terubuk, ikan bilih dan arwana,
- Perbaikan habitat/pemulihan populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan dengan target jenis karang
- Penyadartahuan/edukasi dan sosialisasi keanekaragaman hayati perairan dilindungi/terancam punah serta Penanganan biota laut dilindungi/terancam punah dengan target jenis biota laut dilindungi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 8 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 26. Perbandingan Target dan Capaian IKU 8

IKU 8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
1	-	-	-	-

Hingga berakhirnya triwulan II 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada triwulan II 2023, terdapat realisasi capaian pada IKU ini dengan dirampungkannya pendataan teripang. Pada tahun 2024 ini, target pencapaian jenis dijadwalkan tahunan. Atas dasar hal tersebut, kenaikan

capaian dari triwulan II 2023 ke triwulan II 2024 tidak dapat dibandingkan karena memiliki frekuensi pengukuran yang berbeda.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 27. Rincian Target dalam RPJMN 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKU 8 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKU 8 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan sidat, penyudu, belida, terubuk, dan ikan bilih, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Pada jenis karang, pendataan juga dibantu oleh Kelompok Masyarakat binaan BPSPL Padang di Aceh Barat Daya dan Pesisir Selatan. Selain itu, dukungan dari pihak lain juga terdapat pada kegiatan respon cepat penanganan biota terdampar. Pada kegiatan respon cepat, BPSPL Padang kerap berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat, Dinas, LSM, dan stakeholder setempat lainnya. Sementara itu, pada kegiatan yang membutuhkan survei lapangan secara langsung, seperti monitoring *coral stock center*, pendataan sidat, pendataan arwana, dan monitoring teripang, tim pelaksana juga melakukan perencanaan dan persiapan yang mengantisipasi adanya kemungkinan cuaca buruk. Tim survei juga membekali diri dengan peralatan yang memadai untuk survei menyesuaikan dengan data yang dibutuhkan dan tipe kegiatan yang dilakukan. Antisipasi tersebut diperlukan untuk memastikan keselamatan tim dan kesesuaian data yang terkumpul. Tanpa adanya pertimbangan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat terhambat dan berimplikasi pada kualitas pendataan. Selama proses pelaksanaan kegiatan, BPSPL Padang telah mengantisipasi terjadinya hal-hal yang diduga dapat menghambat capaian sehingga tidak ditemukan kendala/permasalahan yang tidak dapat diatasi.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam penyeteroran data dari enumerator berbasis daring. Selain itu, terjalinnya kerja sama dan komunikasi aktif dengan stakeholder lain juga dilakukan untuk penanganan jenis ikan terdampar di lokasi yang terkendala jarak dan akses.

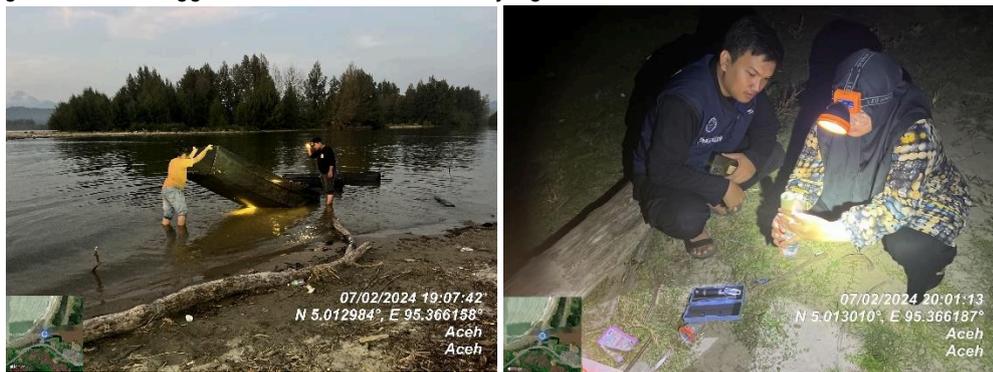
E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 8 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan dapat terjaga. Dalam hal kegiatan penanganan, koordinasi dan komunikasi aktif dengan *stakeholder* lain juga penting agar dapat menjangkau lokasi keterdamparan yang terkendala jarak dan akses. Berikut adalah kegiatan pendukung keberhasilan capaian IKU 8.

1. Sidat

a. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Jaya dilaksanakan di Kecamatan Indra Jaya selama sebelas bulan dengan dibantu oleh dua tenaga enumerator. Dalam kurun waktu tersebut, pendataan dilakukan selama lima - enam hari setiap bulannya atau 60 hari selama sebelas bulan. Adapun metode yang dilakukan adalah survei langsung menggunakan alat tangkap bubu jaring yang memiliki frame besi dengan dimensi Tinggi 50 cm, Lebar 100 cm, Panjang 300 cm.



Gambar 17. Dokumentasi Supervisi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Jaya

b. Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar

Pendataan sidat di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di Muara Beureunut, Kecamatan Seulimeum. Metode yang dilakukan adalah pengumpulan data terkait potensi sidat pada stadia *glass eel* menggunakan tiga alat tangkap bubu ukuran 3 m x 1 m x 50 cm yang dilaksanakan setiap triwulan untuk mengetahui puncak kemunculan sidat. Pendataan pada triwulan I 2024 telah dilaksanakan pada 9 s.d. 11 Maret 2024. Lebih lanjut, pendataan pada triwulan II 2024 telah dilaksanakan pada 7 s.d. 9 Mei 2024.



Gambar 18. Dokumentasi Pendataan Sidat di Kabupaten Aceh Besar

c. Pendataan Sidat di Kabupaten Agam

Pendataan sidat di Kabupaten Agam dijadwalkan pada musim penghujan dengan estimasi bulan Oktober dan November.

2. Teripang

Pendataan teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan pada 3 s.d. 7 Maret 2024. Adapun metode yang digunakan adalah wawancara terkait pemanfaatan teripang dan survei sebaran teripang. Responden pada wawancara adalah pengepul dan nelayan teripang. Berdasarkan hasil wawancara, teripang yang paling banyak dikumpulkan adalah teripang gamat/kacang, pulut, dan karang dengan rata-rata per hari terkumpul kurang dari 10 kg atau sebulan mencapai 50 kg. Harga jual teripang tertinggi, yaitu jenis gamat, mencapai Rp950.000,00/kg dan tertinggi adalah teripang pulut dan karang seharga Rp350.000,00/kg. Untuk menangkap teripang, nelayan menyelam secara manual pada kedalaman 4 s.d. 7 meter dan menggunakan kompresor hingga kedalaman 10 s.d. 15 meter tanpa bantuan alat tangkap. Penangkapan dilakukan sepanjang tahun.

Lebih lanjut, survei sebaran teripang dilaksanakan dengan metode jelajah di tujuh titik survei, yaitu Simakakkang, Pulau Siburu, Putotogot, Jati, Taitaiumatsiteut bagian luar, Simobuk, dan Taitaiumatsiteut bagian dalam. Adapun panjang lintasan di tujuh lokasi survei tersebut berkisar antara 300-900 meter dengan kedalaman 3 s.d. 20 meter. Penyelaman dilakukan selama 3 malam bersama nelayan lokal. Hasil pendataan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini dan akan dianalisis lebih lanjut.

Tabel 28. Hasil Survei Sebaran Teripang di Pulau Sipora

Nomor	Lokasi	Hasil Survei
1	Simakakkang	Ditemukan 6 ekor teripang dari jenis <i>Thelenota anax</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria edulis</i>
2	Pulau Siburu	Ditemukan 14 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., <i>Holothuria atra</i> , dan <i>Holothuria edulis</i>
3	Putotogot	Ditemukan 10 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria atra</i>
4	Jati	Ditemukan 8 ekor teripang dari jenis <i>Bohadschia marmorata</i> , <i>Stichopus</i> spp., dan <i>Holothuria atra</i>
5	Taitaiumatsiteut bagian luar	Ditemukan 37 ekor teripang dari jenis <i>Stichopus</i> spp., <i>Pearsonothuria graeffei</i> , <i>Holothuria fuscocinerea</i> , <i>Bohadschia vitiensis</i> , <i>Bohadschia marmorata</i> , dan <i>Holothuria atra</i>
6	Simobuk	Ditemukan 15 ekor teripang <i>Pearsonothuria graeffei</i> , <i>Bohadschia vitiensis</i> , <i>Bohadschia marmorata</i> , dan <i>Holothuria atra</i>
7	Taitaiumatsiteut bagian dalam	Ditemukan 9 ekor teripang dari jenis <i>Stichopus</i> spp., <i>Pearsonothuria graeffei</i> , dan <i>Bohadschia vitiensis</i> .



Gambar 19. Dokumentasi Pendataan Teripang di Pulau Sipora, Kabupaten Kep. Mentawai

3. Penyu

a. Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pendataan pendaratan penyu dilaksanakan di Pantai Buggeisiata, Desa Betumonga, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendataan dilaksanakan pada musim peneluran penyu, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, dan Desember dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun pendataan aktivitas pendaratan, jejak, dan sarang dilaksanakan melalui patroli

malam. Kegiatan ini didukung oleh Perjanjian Kerja Sama antara BPSPL Padang dengan Yayasan Penyu Indonesia.



Gambar 20. Dokumentasi Pendataan Penyu di Kabupaten Kepulauan Mentawai

b. Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar, Kabupaten Simelue

Pendataan penyu di Pulau Salaut Besar berlangsung pada Januari, Februari, November, dan Desember, yang mana juga didukung oleh Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Penyu Indonesia. Sama halnya dengan pendataan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, pendataan dilaksanakan dengan sistem *shifting* pada setiap malam dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 21. Dokumentasi Pendataan Penyu di Pulau Salaut Besar

4. Karang

a. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Barat Daya

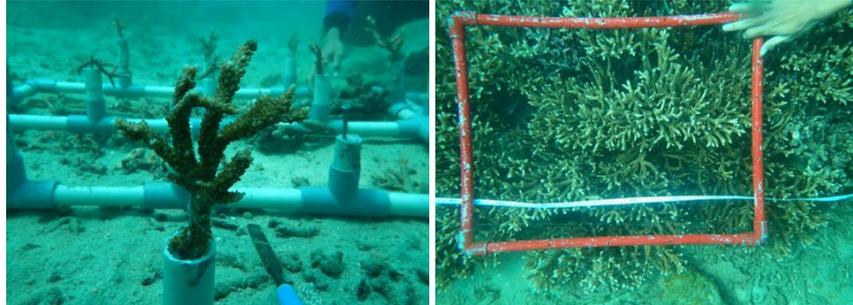
Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Barat Daya dilaksanakan di perairan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Aceh Barat Daya, Kecamatan Susoh. Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2022 dengan metode rehabilitasi berupa meja transplantasi dan coral tree nursery. Hingga saat ini, meja transplantasi yang telah terpasang adalah 25 unit dan coral tree nursery yang telah terpasang berjumlah 10 unit. Adapun pendataan dibantu oleh Kelompok Pusong Diving Club di Aceh Barat Daya dengan frekuensi pendataan 10 kali dalam satu tahun.



Gambar 22. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Barat Daya

b. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di KKPD Aceh Besar

Pendataan dan monitoring terumbu karang di Kabupaten Aceh Besar dilaksanakan di perairan sekitar Pulau Tuan, Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada. Kegiatan ini dilakukan berkolaborasi dengan Ocean Diving Club (ODC) Universitas Syiah Kuala. Adapun total fragmen transplantasi karang yang ditanam berjumlah 60 *pieces*.



Gambar 23. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Aceh Besar

c. Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Kabupaten Pesisir Selatan

Monitoring dan pemeliharaan *coral stock center* dilaksanakan di Perairan Batu Kajang, Nagari Sungai Pinang, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun model rehabilitasi yang dilakukan adalah metode rak besi dan beton sejumlah 66 unit (51 unit beton dan 15 unit besi) dengan jumlah bibit karang yang ditanam 306 *pieces* pada rak beton dan 240 *pieces* pada rak besi. Pada tahun 2024, pendataan dijadwalkan dengan frekuensi tiga kali dalam setahun.



Gambar 24. Dokumentasi Pendataan dan Monitoring Terumbu Karang di Pesisir Selatan.

d. Rehabilitasi Terumbu Karang

Hingga triwulan II 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan survei identifikasi lokasi rehabilitasi terumbu karang di dua lokasi, yaitu Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dan Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Survei di Pasaman Barat dilaksanakan pada 1 s.d. 4 Mei 2024, sementara survei di Bintan dilaksanakan pada 6 s.d. 9 Mei 2024.





Gambar 25. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Pasaman Barat



Gambar 26. Dokumentasi Survei Identifikasi Lokasi Rehabilitasi Terumbu Karang di Bintan

5. Ikan Belida

a. Pendataan Time-Series

Pendataan *time-series* ikan belida dilaksanakan di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan dalam kurun waktu Januari hingga Desember dibantu oleh enumerator selama 300 hari dalam satu tahun anggaran. Di Kabupaten Tebo, Jambi, pengumpulan data di lapangan menggunakan alat tangkap pukat (jaring insang). Sementara itu, di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pengumpulan data belida di lapangan menggunakan alat tangkap pengilar (perangkap). Dalam hal ini, tim BPSPL Padang turut melaksanakan supervisi pendataan.



Gambar 27. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Tebo



Gambar 28. Dokumentasi Supervisi Pendataan Belida di Kabupaten Muara Enim

g. Survei Sebaran Pendataan Ikan Belida

Survei sebaran pendataan Ikan Belida telah dilakukan di tiga lokasi. Survei di Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dilaksanakan pada 19 s.d. 22 Februari 2024 dan 11 s.d. 14 Juni 2024 dengan metode survei langsung, pengumpulan data sosial ekonomi, pengumpulan data sekunder, dan pengamatan aktivitas antropogenik. Di Kabupaten Ogan Ilir, ditemukan ikan Belida Jawa sementara di Kota Prabumulih ditemukan Belida Sumatera. Lebih lanjut, survei di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi telah dilaksanakan pada 20 s.d. 23 Februari 2024 dengan ikan belida yang ditemukan berjenis Belida Sumatera (*Chitala hypselonotus*).



Gambar 29. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Ogan Ilir



Gambar 30. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kota Prabumulih



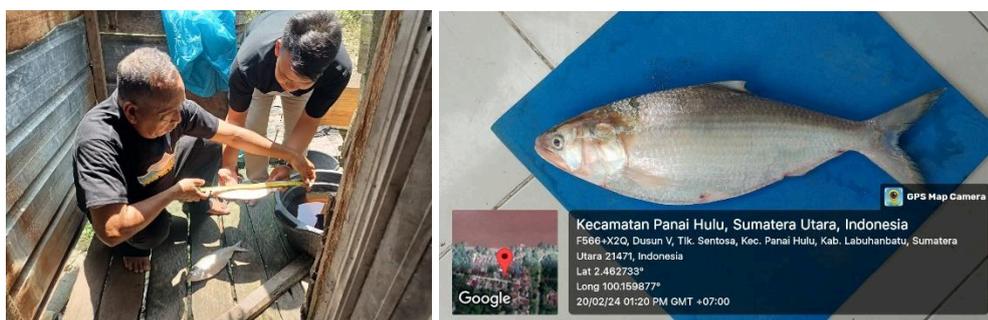
Gambar 31. Dokumentasi Survei Sebaran Belida di Kabupaten Bungo

6. Terubuk

Pendataan ikan terubuk dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Sumatera Utara dan Riau selama sepanjang tahun pada Januari hingga Desember. Di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, pendataan terubuk jenis *Tenualosa ilisha* dilaksanakan sepanjang tahun dibantu oleh tenaga enumerator. Sementara itu, di Bengkalis dan Siak, Provinsi Riau pendataan terubuk jenis *Tenualosa macrura* dilakukan pada fase bulan gelap (27, 28, 29, 30) dan bulan terang (13, 14, 15, dan 16) penanggalan hijriah dengan dibantu oleh tenaga enumerator. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah pendekatan *Length Based-Spawning Potential Ratio* (LB-SPR) yang dapat menggambarkan status eksploitasi stok perikanan, yang secara umum dapat mengacu kepada kriteria yang ditetapkan oleh NOAA Fisheries dalam Badaruddin (2013) sebagai berikut.

SPR	< 30%	30 – 50%	> 50%
Status Eksploitasi	MERAH	KUNING	HIJAU
	Over-exploited	Fully-exploited	Under-exploited

Gambar 32. Status Eksploitasi Perikanan Berdasarkan Nilai SPR



Gambar 33. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Labuhan Batu



Gambar 34. Dokumentasi Supervisi Pendataan Terubuk di Kabupaten Bengkalis

7. Ikan Bilih

Pendataan ikan bilih berfokus di Danau Singkarak yang berlokasi di Kabupaten Solok dan Tanah Datar. Hingga Triwulan II 2024, telah dilaksanakan pendataan yang disertai dengan supervisi enumerator pendataan ikan bilih. Adapun lokasi pendataan yang ditetapkan antara lain Nagari Sumpur, Muara Pingai dan X Koto Singkarak sedangkan jenis alat tangkap yang digunakan antara lain jala (sungai dan danau), jaring dan bagan. Pendataan dilaksanakan dari bulan Januari hingga Desember 2024 selama 8 hari pendataan per bulan.



Gambar 35. Dokumentasi Supervisi Pendataan Ikan Bilih di Danau Singkarak

8. Arwana

Pendataan arwana direncanakan di tiga provinsi, yaitu Riau, Jambi, dan Sumatra Selatan. Hingga Triwulan II 2024, BPSPL Padang telah melaksanakan survei potensi dan pendataan arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi, Kabupaten Ogan Ilir dan Muara Enim, Sumatra Selatan, dan Kabupaten Rokan Hulu, Riau.

a. Survei Potensi Arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi

Survei potensi arwana di Kabupaten Sarolangun, Jambi dilaksanakan pada 20 s.d. 22 Maret 2024 untuk mengumpulkan informasi awal keberadaan arwana di Kawasan Konservasi Ikan Arwana Sarolangun yang berada dalam pengawasan Pokmaswas Siluk Kutur. Kawasan Konservasi Ikan Arwana Sarolangun merupakan habitat alami ikan arwana silver jambi/green/pino (*Scleropages formosus*). Arwana silver jambi tersebut terakhir kali tertangkap pada tahun 2022 dengan alat tangkap tajam. Arwana tersebut sempat ditangkap di kolam milik Kepala Desa namun akhirnya mati karena kekurangan oksigen. Kondisi perairan di sekitar Kawasan Konservasi Ikan Arwana Sarolangun saat ini keruh. Hal ini disebabkan maraknya penambangan emas tanpa izin (PETI) di hulu sungai yang berdampak pada kekeruhan di sepanjang aliran sungai. Selain karena itu, pengambilan ikan arwana

di alam oleh masyarakat luar desa secara berlebihan sejak 2010 juga menyebabkan semakin sulit ditemukannya arwana di Kawasan Konservasi tersebut.



Gambar 36. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Sarolangun

b. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatra Selatan

Survei pendataan arwana di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 3 Mei 2024 dengan metode wawancara kepada nelayan yang pernah mendapatkan ikan arwana maupun yang pernah melihat ikan arwana di sungai tempat nelayan tersebut memancing ikan. Berdasarkan hasil survei di lapangan melalui wawancara kepada dua orang nelayan di Desa Burai mengenai ikan Arwana, didapatkan informasi bahwa ikan Arwana sudah tidak pernah terlihat lagi sejak tahun 2008. Pada tahun tersebut pun hanya terlihat 1 ikan Arwana Hijau pada bulan September yang berukuran lumayan besar dengan berat sekitar 4 kg yang ditangkap menggunakan waring pada waktu siang hari di Sungai Kelekar. Ikan Arwana tersebut diambil dan direncanakan akan dijual di Kota Palembang dengan harga 5 juta untuk 1 ekor ikan Arwana dengan berat 4 kg. Calon pembeli memang sudah ada dan merupakan penjual ikan Arwana sebagai ikan hias. Namun saat akan diambil oleh penjual, ikan Arwana tersebut mati. Nelayan juga pernah melihat anakan Arwana pada tahun 2000an tapi saat itu tidak ditangkap namun langsung dilepas. Nelayan yang ke-dua juga menyampaikan pernah melihat Arwana pada tahun 2000an namun tidak ditangkap. Berdasarkan informasi nelayan setempat, dari dulu di lokasi survei tidak pernah ada nelayan yang secara khusus menangkap ikan Arwana. Nelayan juga menginformasikan bahwa lokasi sungai ditemukannya ikan Arwana adalah sungai kosong yang tidak terdapat pohon maupun semak-semak dengan dasar perairan lumpur dan air sungai yang jernih, dan juga sungai jernih yang terdapat batang-batang besar dengan dasar perairan tanah. Nelayan mengungkapkan menurunnya populasi ikan Arwana dimungkinkan karena rusaknya habitat dikarenakan limbah yang berasal dari pabrik, maupun penggunaan alat setrum yang merusak lingkungan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kualitas perairan tempat pernah ditemukannya ikan Arwana. Pengukuran yang dilakukan antara lain pH, suhu, dan kecerahan.



Gambar 37. Dokumentasi Survei Pendataan Arwana di Kab. Ogan Ilir

c. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan

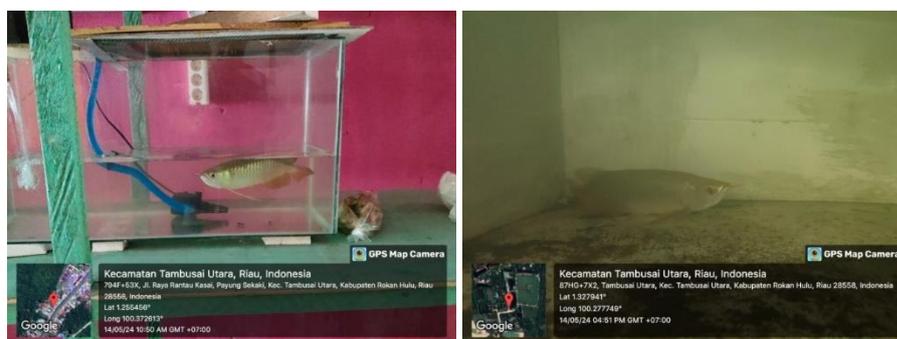
Survei pendataan arwana di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dilaksanakan pada 13 s.d. 15 Mei 2024. Berdasarkan hasil wawancara kepada Nelayan di Sungai Kelekar, Desa Segayam diketahui bahwa arwana yang lebih dikenal dengan nama lokal tangkeleso ukuran dewasa terakhir kali tertangkap nelayan sekitar tahun 1999 s.d. 2000 menggunakan alat tangkap serundut di habitat sungai yang berarus sedang dan masih terdapat anakan arwana yang ditemukan pada perairan dangkal dengan dasar tanah. Terdapat ancaman terhadap habitat arwana berupa Jumlah Indukan yang sedikit, kerusakan habitat akibat adanya pencemaran yang bersumber dari limbah pabrik dari hulu sungai yang berdampak pada sepanjang aliran sungai, serta penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan berupa setrum. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari nelayan di Desa Sungai Rotan ikan arwana pernah tertangkap di aliran anak Sungai Lematang dengan menggunakan jaring namun saat ini sudah ditemukan lagi ikan arwana. Tim kemudian melakukan pengambilan titik koordinat lokasi tertangkapnya arwana, pengukuran kualitas air dan aktivitas antropogenik dengan menyusuri sungai menggunakan kapal.



Gambar 38. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Muara Enim

d. Survei Pendataan Arwana di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

Survei pendataan arwana di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dilaksanakan pada 13 s.d. 17 Mei 2024. Berdasarkan hasil penelusuran, diperoleh informasi bahwa habitat arwana berlokasi di Desa Mahato dan Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara. Di samping itu, terdapat Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor 169 tahun 2009 tentang Penunjukkan Hutan Produksi Terbatas Mahato Kanan (Rawa Seribu) seluas 3.700 ha sebagai Kawasan Konservasi Ikan Arwana, namun belum efektif karena belum dapat menekan alih fungsi lahan dan masifnya pembukaan lahan sawit. Kawasan konservasi arwana tersebut dikelola oleh HKM Gapoktan Tambusai Utara. Gapoktan ini mendapatkan indukan arwana dengan cara membeli dari masyarakat yang melaksanakan penangkapan, kemudian indukan tersebut dikembangkan di dalam kolam penangkaran milik kelompok. Saat ini kelompok memiliki 10 ekor indukan dan anakan, yang berjumlah 17 ekor.



Gambar 39. Dokumentasi Survei Potensi Pendataan Arwana di Kab. Rokan Hulu

9. Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi

Hingga triwulan II 2024, BPSPL Padang terlibat dalam sepuluh kejadian biota laut terdampar sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 29. Rekapitulasi Respon Cepat Penanganan Jenis Ikan Dilindungi

No	Lokasi	Tanggal	Jenis	Kode	Penanganan
1	Sungai Kembung, Kecamatan Teuk Pambang, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau	1 Januari 2024	Dugong (<i>Dugong dugon</i>)	1	Dilepasliarkan
2	Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	5 Januari 2024	Pesut (<i>Orcaella brevirostris</i>)	4	Dikubur
3	Pantai Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	8 Januari 2024	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan
4	Pantai Gunung Rajo, Nagari Surantih, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	10 Januari 2024	Penyu Lekang (<i>Lepidochelys olivacea</i>)	1	Dilepasliarkan
5	Pantai Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	30 Januari 2024	Lumba-lumba pemintal (<i>Stenella longirostris</i>)	3	Dikubur
6	Pantai Sungai Nipah, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat	12 Februari 2024	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dirawat lalu dikubur
7	Pantai Lhok Bengkuang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh	12 Februari 2024	Lumba-lumba	1	Dilepasliarkan
8	Pantai Keramat, Kota Sabang, Provinsi Aceh	17 Februari 2024	Paus Pilot (<i>Globicephala macrorhynchus</i>)	2	Dikubur
9	Pantai Lagoi Bay, Kelurahan Sebong Lagoi, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau	19 Februari 2024	Paus Sperma Kerdil (<i>Kogia breviceps</i>)	1	Dirawat lalu dikubur
10	Pantai Mo'ale, Kecamatan O'ou, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatra Utara	3 Maret 2024	Paus Balin	4	Dibakar
11	Pantai Batu Kalang, Nagari Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan	15 April 2024	Penyu Hijau (<i>Chelonia mydas</i>)	1	Dilepasliarkan

Kode kondisi keterdamparan

Kode 1: Terdampar hidup

Kode 2: Terdampar, baru mati

Kode 3: Mulai membusuk

Kode 4: Pembusukan tingkat lanjut

Kode 5: Kerangka atau mumi



Gambar 40. Dokumentasi Penanganan Jenis Ikan Terdampar

10. Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Terancam Punah

Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau biota terancam punah telah dilaksanakan di Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi pada 25 April 2024. Pada kesempatan tersebut, disampaikan informasi jenis-jenis ikan dilindungi, terutama di perairan sungai.



Gambar 41. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Muaro Jambi

Sosialisasi jenis ikan dilindungi juga dilaksanakan di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan pada tanggal 25 April 2024. Selain menyampaikan informasi terkait jenis ikan dilindungi, tim juga melaksanakan pengumpulan informasi mengenai biota dilindungi dan/atau terancam punah yang ada di Kabupaten Ogan Ilir dari peserta yang hadir dimana diketahui jenis ikan Arwana sumatra, Arwana jawa, dan ikan balashark yang masih relatif mudah ditemui.



Gambar 42. Dokumentasi Sosialisasi Jenis Ikan Dilindungi di Kab. Ogan Ilir

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 8 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.001] Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 30. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 8

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.001.051] Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	664.695.000,00	341.093.911,00	51,3
2	[2362.REB.001.052] Rehabilitasi Populasi Habitat Kritis Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah	132.802.000,00	36.373.280,00	27,4
3	[2362.REB.001.053] Respon Cepat Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah	42.003.000,00	26.453.450,00	63
4	[2362.REB.001.054] Sosialisasi Biota Dilindungi/Terancam Punah	60.500.000,00	25.486.500,00	42,1
Total		900.000.000,00	429.407.141,00	47,7

Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.001] secara keseluruhan adalah 47,7%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan penyediaan data jenis sidat, terubuk, penyu, terumbu karang, teripang, belida, ikan bilih, arwana serta penanganan biota dilindungi terdampar. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp625.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp275.000.000,00.

IKU. 9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)

Jenis ikan yang dimaksud pada IKU ini adalah jenis yang dilakukan upaya fasilitasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix CITES, dan/atau *look alike species* dan survei potensi pemanfaatan. Adapun tata cara pemanfaatan jenis ikan mengacu pada Permen KP Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang terancam dalam appendix CITES. Target Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan Pemanfaatan adalah Hiu Appendix, Pari Appendix, Kuda Laut, Napoleon, dan Sidat di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 9 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 31. Perbandingan Target dan Capaian IKU 9

IKU. 9 Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

IKU ini tidak diukur pada triwulan II karena memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023 – triwulan II 2024 karena IKU ini tidak memiliki frekuensi pengukuran triwulanan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan langsung dengan indikator ini. Indikator pada Rencana Strategis DJPRL memiliki rincian yang sama dengan Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang dijadikan acuan pada perbandingan dengan standar nasional.

Tabel 32. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 9 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Keanekaragaman hayati perairan terancam punah yang dilindungi dan/atau dilestarikan	Jumlah keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dan/atau dilestarikan	6	10	14	18	20	Pusat

Dalam hal ini, indikator kinerja Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKU 9 tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Dalam pendataan hiu, pari, dan kuda laut, tim BPSPL Padang dibantu oleh enumerator sehingga diperoleh pendataan *time series*. Dalam hal ini, supervisi terhadap enumerator dapat menunjang keberhasilan kegiatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang sesuai untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara itu, dalam lingkup pelayanan, koordinasi dan verifikasi jarak jauh juga dapat mendukung keberlanjutan kegiatan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada perekrutan tenaga enumerator yang kompeten dan mudah diarahkan melalui koordinasi jarak jauh. Selain itu, penggunaan aplikasi e-SAJI dan e-Sultan's juga mendukung kegiatan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan secara sistematis.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan/kegagalan pencapaian IKU 9 dapat ditunjang oleh kegiatan supervisi yang perlu dilakukan secara rutin dan menyeluruh kepada tenaga enumerator. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar kualitas data yang dikumpulkan tetap terjaga.

a. Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan

Kegiatan pelayanan perizinan jenis ikan yang dimanfaatkan dilaksanakan di tujuh provinsi wilayah kerja BPSPL Padang, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sepanjang triwulan II 2024, BPSPL Padang telah melayani peredaran jenis hiu, pari, teripang, arwana, dan napoleon melalui penerbitan 194 Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri (DN) dan 262 Rekomendasi.

Berikut adalah rekapitulasi pelayanan berdasarkan dari penerbitan SAJI dan rekomendasi.

Tabel 33. Rekapitulasi Pelayanan Jenis Triwulan II 2024

Jenis Dokumen	Jumlah Dokumen yang Terbit	Nilai PNPB (Rp)
Rekomendasi	262	192.365.182,00
SAJI Dalam Negeri	194	261.705.656,00
Total	456	454.070.838,00

Untuk menunjang pelayanan prima di lingkup BPSPL Padang, pada tanggal 2 Februari 2023 BPSPL Padang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu (SMM) Registration No.: QAIC/ID/11112-A dengan ruang lingkup pelayanan administrasi dalam lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi dan/atau appendiks CITES). Kemudian, pada tanggal 5 April 2024, BPSPL Padang memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaapan (SMAP) Registration No.:

QAIC/ID/11112-E dengan ruang lingkup yang sama. Dalam hal ini, produk layanan BPSPL Padang berupa SAJI Dalam Negeri dan Rekomendasi juga telah terdaftar dalam sertifikasi ini (Lampiran 2).

b. Pendataan Potensi Jenis yang Dimanfaatkan

- Hiu Appendiks dan Pari Appendiks

Pendataan pendaratan hiu dan pari dilaksanakan di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Riau. Pendataan di Aceh dilakukan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo di Banda Aceh, Pelabuhan Labuhan Haji di Aceh Selatan, dan Ujong Serangga di Aceh Barat Daya. Sementara itu, pendataan di Sumatra Utara dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga. Di Riau, pendataan dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendataan dilaksanakan dengan dibantu oleh tenaga enumerator selama 12 bulan dengan jumlah hari 25 hari/bulan.



Gambar 43. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPS Lampulo, Kota Banda Aceh



Gambar 44. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Labuhan Haji, Aceh Selatan



Gambar 45. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di Pelabuhan Ujong Serangga, Aceh Barat Daya



Gambar 46. Dokumentasi Supervisi Pendataan Hiu dan Pari di PPN Sibolga



Gambar 47. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Bengkalis



Gambar 48. Dokumentasi Pendataan Hiu dan Pari di Kabupaten Kepulauan Meranti

- **Kuda Laut**

Pendataan kuda laut di Desa Seborg Perih, Bintan dan Batam menggunakan pendataan hasil tangkapan kuda laut nelayan yang dikumpulkan oleh enumerator selama musim tangkap kuda laut, yaitu bulan Januari sampai Mei. Data tersebut kemudian dianalisis untuk diperoleh nilai *Catch per Unit Effort* (CPUE).



Gambar 49. Dokumentasi Pendataan Kuda Laut

- Napoleon

Pendataan napoleon di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau telah dilaksanakan pada 23 s.d. 27 April 2024. Pendataan dilakukan dengan wawancara dan survei lapangan. Pada pendataan tersebut, dilakukan pencatatan nelayan yang aktif dalam pembesaran, pengepul, dan pengumpul bibit ikan napoleon. Selain itu, tim BPSPL Padang juga melaksanakan sosialisasi lalu lintas jenis ikan *look alike species*.



Gambar 50. Dokumentasi Pendataan Napoleon di Natuna

- Sidat

Pendataan sidat dilaksanakan di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Pendataan berlangsung selama satu tahun dengan dibantu oleh tenaga enumerator.



Gambar 51. Dokumentasi Pendataan Pemanfaatan Sidat di Kabupaten Agam

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 9 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [2362.REB] Konservasi Jenis/Spesies dengan Rincian Output (RO) [2362.REB.002] Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 34. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 9

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.REB.002.051] Penyediaan Data Potensi dan Status Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES	362.350.000,00	92.406.494,00	25,5
2	[2362.REB.002.052] Pelayanan Peredaran Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendiks CITES	864.850.000,00	332.839.213,00	38,5
Total		1.227.200.000,00	425.245.707,00	34,7

Realisasi anggaran rincian output [2362.REB.002] adalah 34,7%. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan pendataan jenis (hiu, pari, kuda laut) dan pelayanan peredaran pemanfaatan jenis ikan berupa SAJI, SIPJI, dan rekomendasi. Rincian output ini bersumber dari rupiah murni senilai Rp285.000.000,00 dan bersumber dari PNPB senilai Rp1.115.000.000,00. Adapun rincian output ini juga berdampak blokir senilai Rp172.800.000,00.

IKU. 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)

Pemanfaatan air laut selain energi adalah Pemanfaatan air laut selain energi yang menghasilkan produk/ekstraksi termasuk yang berasal dari Laut Dalam dengan skala lebih besar dari 50 liter/detik dan/atau berada pada kawasan konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 hari). Sementara itu, identifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah inventarisasi/pengumpulan data dan informasi yang menghasilkan produk dan/atau jasa, yang akan didorong proses perizinannya. Verifikasi pemanfaatan air laut selain energi adalah pemeriksaan untuk memastikan atas kebenaran dokumen dan data pengurusan perizinan air laut selain energi. Verifikasi ini dilakukan apabila terdapat permohonan di OSS. Capaian IKU ini diperoleh dengan menginventarisasi dan menghitung jumlah dokumen identifikasi dan/atau verifikasi perizinan pemanfaatan air laut selain energi.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 10 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 35. Perbandingan Target dan Capaian IKU 10

IKU 10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKU ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan II 2023 dan triwulan II 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang juga tidak termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU ini didukung dengan identifikasi dan sosialisasi pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE). Hingga saat ini, belum terdapat Petunjuk Teknis terkait identifikasi pemanfaatan ALSE. Dalam hal ini, Direktorat Jasa Kelautan telah menyelenggarakan sosialisasi dan menyusun panduan izin pemanfaatan ALSE. Ke depannya, koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jasa Kelautan dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan aplikasi Zoom yang dapat digunakan tim pelaksana untuk mengikuti sosialisasi pemanfaatan ALSE secara daring. Dengan adanya aplikasi Zoom, sosialisasi tersebut dapat menjangkau dan meningkatkan pemahaman seluruh anggota tim pelaksana tanpa membutuhkan biaya yang banyak untuk menghadirkan seluruh tim secara luring.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU ini didukung oleh sosialisasi dan identifikasi pelaku usaha pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE).

1. Sosialisasi dan Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai, Riau

Kegiatan Sosialisasi dan Identifikasi Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) merupakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan terutama bagi pelaku usaha pemegang izin dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang sudah terbit dengan Skala lebih dari 50 (lima puluh) liter/detik dan/atau berada pada Kawasan Strategi Nasional, Kawasan Strategi Nasional Tertentu, Kawasan Konservasi serta ditujukan untuk kepentingan komersial skala luas yang memanfaatkan ruang laut secara menetap minimal 30 (tiga puluh) hari. Berdasarkan PP 85 Tahun 2021 terdapat dua kategori untuk perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) yang Menghasilkan Produk 2,5% per tahun dari Nilai Produksi (ekstraksi) dan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan) yaitu Rp 0,25 /m³ per tahun.

Identifikasi di Kota Dumai dilaksanakan pada 28 s.d. 29 Maret 2024 dengan melakukan beberapa pengecekan indikator seperti Jumlah Pipa, *Intake* Air Bahang, Jumlah Pompa *Intake* Air Bahang, Kapasitas *Intake* Air Bahang (m³), Jumlah Pipa *Intake* RO (*Reverse Osmosis*), Jumlah Pompa *Intake* RO, Kapasitas *Intake* RO (m³), Jumlah *Outfall* Air Bahang, Jumlah *Outfall* RO, Jumlah *Flowmeter*, Jumlah Tangki Hasil RO, Kapasitas Tangki Hasil RO dan Koordinat lokasi keberadaan pemanfaatan Air laut selain energi. Berdasarkan pemantauan tersebut, teridentifikasi tujuh pelaku usaha yang memanfaatkan ALSE dan menghasilkan produk. Adapun kendala yang ditemukan adalah terdapat perusahaan yang masih dalam pengurusan izin dasar PKKPRL sehingga belum dapat mengajukan

permohonan perizinan berusaha pemanfaatan ALSE. Hal-hal tersebut akan dikonsultasikan kembali pada saat Sosialisasi Pemanfaatan ALSE.



Gambar 52. Dokumentasi Sosialisasi dan Identifikasi Pelaku Usaha Pemanfaatan ALSE di Kota Dumai

2. Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE)

Sosialisasi perizinan pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) dilaksanakan pada Selasa, 21 Mei 2024 di Hotel The Zuri, Kota Dumai, Provinsi Riau. Kegiatan ini dihadiri oleh 45 peserta luring dan 106 orang peserta daring. Narasumber pada pertemuan ini meliputi:

- a. Zulmasri, S.T., M.Si selaku Subkoordinator Tata Ruang Laut dan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, yang menyampaikan materi terkait Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir/Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Riau dalam RTRW Provinsi Riau 2023-2043;
- b. Iqbal Suhaimi Gultom, S.I.K., selaku Ketua Tim Kerja Pelayanan Perizinan Berusaha Jasa Kelautan, Direktorat Jasa Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang menyampaikan materi terkait Perizinan Berusaha Jasa Kelautan;
- c. Endang Setia Budi, S.Sos., selaku Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Direktorat Pelayanan Perizinan Non Industri Kedeputan Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM, yang menyampaikan materi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Sistem *Online Single Submission* (OSS).



Gambar 53. Dokumentasi Sosialisasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU ini didukung oleh alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2363.PBW] Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan Rincian Output kegiatan tersebut.

Tabel 36. Realisasi Rincian Output Pendukung IKU 10

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2363.PBW.002] Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000,00	66.718.054,00	66,7
Total		100.000.000,00	66.718.054,00	66,7

Realisasi anggaran pada KRO [2362.PEC] adalah 66,7%. Keseluruhan rincian output ini bersumber dari PNBSP.

IKU. 11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)

Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang melalui Gerakan Bulan Cinta Laut (BCL) yang terdiri dari sosialisasi BCL dan Gerakan Bersih Pantai dan Laut. Bulan Cinta Laut merupakan salah satu program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengelolaan sampah plastik di Laut. Bulan Cinta Laut ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengendalian sampah plastik yang masuk laut dan mengenalkan upaya-upaya penanggulangan dan pengendalian sampah plastik untuk nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat. Capaian IKU ini dihitung dari inventarisasi dan penjumlahan Kabupaten/Kota yang dilakukan penanggulangan pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKU 11 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 37. Perbandingan Target dan Capaian IKU 11

IKU. 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kawasan)				
Realisasi		Triwulan II 2024		
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga berakhirnya periode triwulan II 2024, belum terdapat perolehan capaian terhadap IKU 11. IKU 11 merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan. Adapun lokasi yang menjadi target dalam pencapaian IKU ini meliputi Kota Padang, Kota Batam, Kota Tanjungpinang, dan Kabupaten Deli Serdang.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023-2024. Pada tahun 2023, IKU ini tidak digunakan dalam pengukuran kinerja karena anggaran pendukungnya terdampak blokir hingga akhir tahun.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan dengan indikator ini. Sementara itu,

pada perbandingan dengan standar nasional, terdapat Rincian Target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berkaitan dengan indikator ini.

Tabel 38. Rincian Target dalam RPJMN yang Berkaitan dengan IKU 11 BPSPL Padang

Program	Indikator	Indikasi Target					Lokasi
		2020	2021	2022	2023	2024	
Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran	8	6	6	5	5	27 Lokasi

Dalam hal ini, indikator kinerja Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL dan RPJMN 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah dan standar nasional, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKU 11 didukung oleh partisipasi aktif dari nelayan dalam kegiatan Bulan Cinta Laut. Dalam hal ini, BPSPL Padang akan melaksanakan sosialisasi dan supervisi kepada nelayan untuk mendorong partisipasi dan meningkatkan pemahaman mereka dalam pemilahan sampah.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pelibatan tim dari wilayah kerja terdekat selama pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Selain itu, efisiensi sumber daya juga terdapat pada pelibatan mitra stakeholder terkait selama penyelenggaraan kegiatan.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKU 11 didukung oleh pelaksanaan kegiatan berikut:

1. Identifikasi Calon Lokasi Pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Dalam rangka mendukung penanggulangan pencemaran pesisir, BPSPL Padang melaksanakan identifikasi di lokasi-lokasi yang potensial untuk menjadi lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut. Identifikasi tersebut dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar, Kota Batam, Kota Padang, Kota Duri, Kota Dumai, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang. Kemudian, berdasarkan hasil identifikasi yang mempertimbangkan keaktifan nelayan, ketersediaan mitra, dan profil timbulan sampah, disepakati bahwa lokasi pelaksanaan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang adalah Kota Batam, Kota Padang, Kota Tanjung Pinang, dan Kabupaten Deli Serdang.

2. Verifikasi dan Validasi Data Nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut

Berikut adalah rincian jumlah nelayan Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di masing-masing lokasi.

Tabel 39. Rincian Nelayan Gernas Bulan Cinta Laut yang Terverifikasi dan Tervalidasi

No	Lokasi	Jumlah Nelayan yang Tervalidasi (Orang)
1	Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau	93
2	Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat	87
3	Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau	73
4	Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara	70
Total		323

3. Rekapitulasi Sampah

Berikut adalah rekapitulasi sampah yang terkumpul pada kegiatan Bulan Cinta Laut hingga triwulan II 2024.

Gambar 54. Rekapitulasi Sampah pada Gernas Bulan Cinta Laut di Wilker BPSPL Padang Hingga 1 Juli 2024

No	Lokasi	Sampah Terkumpul (kg)	Sampah Bernilai Ekonomis (kg)	Nilai Ekonomis Sampah Terkumpul
1	Kota Padang, Sumatra Barat	41.238,94	35.831,26	27.244.864
2	Kota Batam, Kepulauan Riau	21.214,5	283,9	567.800
3	Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau	3.064,7	2.789	4.874.197
4	Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara	7.414,7	7.414,7	13.853.510



Gambar 55. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Padang



Gambar 56. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Batam



Gambar 57. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kota Tanjungpinang



Gambar 58. Dokumentasi Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Kab. Deli Serdang

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKU 11 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output [4346.QDD] Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [4346.QDD.001] Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 40. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKU 11

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[4346.QDD.001.051] Aksi Penanggulangan Dampak Pencemaran di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	800.000.000,00	393.371.240,00	49,2
Total		800.000.000,00	393.371.240,00	49,2

Realisasi anggaran komponen [4346.QDD.001.051] adalah 49,2%.

IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Indikator ini ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi atas pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Kategori capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ;
3. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
4. kurang, apabila nilai IKPA > 70 .

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 12 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 41. Perbandingan Target dan Capaian IKM 12

IKM. 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi Triwulan II 2023	Triwulan II 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
92,02	83	99,27	119,6	7,88

Capaian IKPA pada triwulan II 2024 adalah 99,27 atau 119,6% dari target.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BGaSkExSjHd6qBgeUeTyDJoRkg9I2diS>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Terdapat kenaikan 7,88% dari realisasi triwulan II tahun sebelumnya.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, yaitu 93,76, capaian IKPA pada triwulan II memiliki persentase capaian 104,1%.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Sementara itu, untuk perbandingan dengan standar nasional, digunakan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai acuan. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, capaian nilai IKPA memiliki target 90 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian IKPA triwulan II memiliki persentase capaian 110,3% jika dibandingkan dengan target 2024 pada Renstra DJPRL.

Tabel 42. Indikator Kinerja KKP Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 12 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Nilai IKPA (nilai)	88	89	89	90	90

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Upaya pencapaian IKM 12 didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan indikator penilaian. Dalam hal ini, kedisiplinan, konsistensi, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam unsur-unsur pelaksanaan anggaran sangat penting dalam pencapaian nilai IKPA yang baik. Dalam pelaksanaan anggaran, acapkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang dapat menyebabkan penurunan nilai IKPA. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pengelola keuangan dapat melakukan monitoring secara berkala, khususnya dalam hal menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Dengan adanya sistem monitoring tersebut, permasalahan yang ditemukan dapat diatasi dan dimonitor perkembangan tindak lanjutnya.

Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 12 berupa penggunaan teknologi informasi dalam monitoring pengelolaan keuangan menggunakan form *excel* dan *whatsapp group*. Adanya ruang khusus tersebut dapat membantu staf pengelola keuangan untuk memantau perkembangan pelaporan keuangan, mengidentifikasi masalah, dan menindaklanjuti permasalahan yang ditemukan. Selain itu, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) melalui <https://sakti.kemenkeu.go.id/> untuk penyampaian usulan revisi DIPA dan Hal III DIPA dan aplikasi <https://espm.kemenkeu.go.id/> untuk pengajuan SPM. Sebelum terdapat aplikasi, kegiatan tersebut dilakukan secara luring ke KPPN dan Kantor Wilayah Perbendaharaan yang lebih memakan waktu dan tenaga.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 12 dapat ditunjang dengan metode pengawasan yang berjenjang. Dalam hal pelaksanaan anggaran, tim pengelola keuangan BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring yang berguna

untuk memantau perkembangan catatan-catatan yang ditemukan dalam pelaksanaan anggaran. Adanya sistem tersebut dapat mempermudah tim untuk mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti solusi yang dirumuskan.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 12.

IKM. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Adapun cakupan evaluasi kinerja meliputi aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan Satuan Kerja BPSPL Padang ke dalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id) dengan indikator perhitungan meliputi capaian keluaran kegiatan, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 13 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 43. Perbandingan Target dan Capaian IKM 13

IKM. 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga triwulan II 2024 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 13 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023-2024 karena IKM ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Nilai Kinerja Anggaran memiliki target 89 pada tahun 2024. Dalam hal ini, belum terdapat capaian Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dibandingkan.

Tabel 44. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 13 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai NKA (nilai)	85	86	87	98	89

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Kinerja Anggaran tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 13 juga didukung dengan pelaksanaan anggaran yang selaras dengan aspek penilaian Nilai Kinerja Anggaran. Pada tahun 2024, penyajian data pada aplikasi SMART DJA telah terkoneksi dengan pengisian rincian output ke aplikasi SAKTI. Dalam hal ini, BPSPL Padang senantiasa melakukan koordinasi dengan pengelola aplikasi terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka kesesuaian penyajian rincian output.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 13 berupa penggunaan aplikasi SMART DJA yang telah terintegrasi dengan aplikasi penunjang keuangan lainnya sehingga operator SMART DJA tidak perlu menginput realisasi keuangan dan hanya perlu melengkapi capaian rincian output setiap bulannya. Selain itu, perhitungan NKA yang berbasis aplikasi tidak perlu melakukan perhitungan manual.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM 13 didukung oleh pemahaman terhadap Pengukuran nilai kinerja anggaran lebih lengkapnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, pencapaian IKM 13 juga didukung dengan ketaatan dalam penginputan capaian output setiap bulannya.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 13.

IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Predikat tersebut diberikan berdasarkan hasil penilaian yang mengacu PermenPAN RB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Secara teknis, unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan penetapan unit kerja berpredikat menuju WBK:

- a. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
- b. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua pengungkit;
- c. Memiliki nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal 18,25 dengan nilai subkomponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal 15,75 dan subkomponen "Kinerja Lebih Baik" minimal 52,5;
- d. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 14 (Survei 3,20).

Adapun pencapaian IKM ini diperoleh dari perhitungan penilaian WBK oleh Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 14 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 45. Perbandingan Target dan Capaian IKM 14

IKM. 14. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga triwulan II 2023 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 14 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan. Dalam perkembangannya, telah dilaksanakan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM oleh Inspektorat V KKP pada tanggal 20 s.d. 24 Februari. Hingga saat ini, pemantauan tersebut masih berproses dan menghasilkan nilai sementara 88,63.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023-2024 karena IKU ini tidak memiliki frekuensi pengukuran triwulanan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 46. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 14 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (kumulatif) (unit)	6	7	8	9	10

Dalam hal ini, Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di Wilayah Kerja BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Sebagai upaya pencapaian nilai WBK yang maksimal, BPSPL Padang melaksanakan monitoring pembangunan zona integritas secara berkala untuk memantau perkembangan dan pemenuhan masing-masing area pembangunan. Pemantauan berkala ini juga dapat menyelaraskan pemahaman dalam pemenuhan dokumen sehingga dokumen tersebut dapat disusun sesuai dengan kriteria Petunjuk Teknis.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 14 dengan adanya pemantauan oleh Inspektorat Jenderal secara daring. Dalam upaya kontrol secara internal, BPSPL Padang juga menerapkan rapat daring yang dapat diikuti oleh seluruh tim yang tersebar di wilayah kerja BPSPL Padang.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam upaya pencapaian IKM 14, BPSPL Padang menerapkan sistem monitoring secara berkala. Pada kegiatan ini, Ketua Pembangunan Zona Integritas BPSPL Padang memimpin sesi pembahasan yang mencakup evaluasi mandiri, pengecekan dokumen secara menyeluruh, hingga monitoring dari tindak lanjutnya. Adanya kegiatan ini dapat mendukung kedisiplinan tim dalam membangun area pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

a. Pembentukan Tim

Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2024 di lingkup BPSPL Padang ditetapkan melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.277/BPSPL.1/KP.440/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 dan kemudian diperbaharui melalui Surat Tugas Kepala BPSPL Padang Nomor B.756/BPSPL.1/Tu.110/III/2024 tanggal 25 Maret 2024.

b. Penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di BPSPL Padang oleh Inspektorat V KKP

Penilaian pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan pada 20 s.d. 24 Februari 2024. Penilaian ini menghasilkan nilai sementara 88,63 bagi BPSPL Padang. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi perbaikan dapat dipenuhi secara bertahap.

Tabel 47. Hasil Penilaian Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada BPSPL Padang

PENILAIAN			BOBOT	NILAI	%
A.	PENGUNGKIT		60,00	52,55	
	I.	PEMENUHAN	30,00	25,08	83,61
	1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,05	76,16
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,33
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,28	85,58
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	3,58	71,60
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,44	85,87
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	4,82	96,40
	II.	REFORM	30,00	27,46	91,54
	1.	Manajemen Perubahan	4,00	3,42	85,50
	2.	Penataan Tatalaksana	3,50	2,92	83,38
	3.	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5,00	4,25	85
	4.	Penguatan Akuntabilitas	5,00	5,00	100,00
	5.	Penguatan Pengawasan	7,50	6,88	91,67
	6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	5,00	100,00
TOTAL PENGUNGKIT				52,55	87,58
B.	HASIL		40,00	36,08	
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50	20,07	89,19
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK)	17,50	16,32	93,25
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	3,75	75,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50	16,01	91,50

PENILAIAN		BOBOT	NILAI	%
	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal: Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik/IPKP)	17,50	16,01	91,50
TOTAL HASIL				90,20
NILAI PEMANTAUAN PEMBANGUNAN ZI				88,63

c. Monitoring Pembangunan ZI

Monitoring pembangunan zona integritas di BPSPL Padang dilaksanakan triwulanan untuk memantau kelemahan-kelemahan dan merumuskan rekomendasi tindak lanjutnya. Pemantauan ini berguna untuk memastikan komponen-komponen yang harus dipenuhi.

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 14 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBA.958] Layanan Kehumasan. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 48. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 14

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBA.958.052] Pelayanan Publik	17.500.000,00	4.127.000,00	23,6
Total		17.500.000,00	4.127.000,00	23,6

Hingga triwulan II 2024, komponen [2367.EBA.958.052] telah terealisasi 23,6%.

IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)

Indeks profesionalitas (IP) ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Adapun bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi, yang diukur dari indikator Riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, memiliki bobot 25%,
- Kompetensi, yang diukur dari indikator Riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, memiliki bobot 40%,
- Kinerja, yang diukur dari indikator penilaian prestasi kerja, memiliki bobot 30%,
- Disiplin, yang diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin, memiliki bobot 5%.

Penjumlahan dari nilai masing-masing dimensi akan menghasilkan Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori penilaian sebagai berikut:

- 91-100: Sangat Profesional/Sangat Tinggi,
- 81-90: Cenderung Profesional/Tinggi,
- 71-80: Rentan Tidak Profesional/Sedang,
- 61-70: Cenderung Tidak Profesional/Rendah,
- ≤60: Sangat Tidak Profesional/Sangat Rendah.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 15 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 49. Perbandingan Target dan Capaian IKM 15

IKM. 15. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
83,5	83	90,92	109,54	8,89

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan II mencapai 90,92 dengan persentase capaian 109,54%.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DAQT2slcEmXil-bhBPeWGwvZILcZZT9a>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Terdapat kenaikan capaian sebesar 8,89% jika dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II 2023.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, yaitu 88, capaian Indeks Profesionalitas ASN pada triwulan II memiliki persentase capaian 103,32%.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Indeks Profesionalitas ASN memiliki target 76 pada tahun 2024. Dalam hal ini, perbandingan capaian IP ASN BPSPL Padang triwulan II 2024 dengan target Renstra DJPRL adalah 119,63.

Tabel 50. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 15 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (indeks)	72	73	74	75	76

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Indeks Profesionalitas ASN tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 15 didukung dengan adanya kegiatan pengembangan kompetensi yang dapat diikuti pegawai. Setiap pegawai dapat memenuhi diklat 20 JP-nya melalui kegiatan pengembangan diri yang tersedia secara luring dan daring untuk mendorong perolehan Indeks Profesionalitas ASN BPSPL Padang. Namun demikian, pencapaian IP ASN BPSPL Padang tidak meningkat secara signifikan karena tidak ada tambahan pegawai yang meningkat kualifikasi pendidikannya. Maka dari itu, alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan IP ASN BPSPL Padang adalah mendorong pegawai yang telah selesai izin dan tugas belajar untuk segera menyelesaikan tahapan administrasi akhirnya agar gelarnya dapat segera diakui.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam keikutsertaan pegawai BPSPL Padang dalam pengembangan kompetensi berbasis daring. Adanya kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ini dapat memperluas kesempatan bagi seluruh pegawai tanpa dibatasi oleh ketersediaan anggaran.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM 15 didukung oleh keaktifan pegawai dalam mengikuti pengembangan kompetensi workshop/diklat yang diinput ke dalam SIASN. Untuk itu, BPSPL Padang senantiasa melakukan monitor pencapaian IP ASN masing-masing pegawai. Monitoring tersebut dilakukan dengan pengunggahan bukti dukung nilai IP ASN masing-masing pegawai ke laman google drive untuk memudahkan pemantauan.

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 15 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal dengan Rincian Output (RO) [2367.EBC.954] Layanan Manajemen SDM. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 51. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 15

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBC.954.051] Layanan Manajemen SDM	325.367.000,00	221.406.792,00	68
Total		325.367.000,00	221.406.792,00	68

Realisasi anggaran rincian output [2367.EBC.954] adalah 68%.

IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang

Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat empat aspek penilaian di dalam evaluasi tersebut, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Adapun kategori nilai PM SAKIP antara lain sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Sangat Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Memuaskan;
3. predikat BB dengan nilai >70-80 dengan kategori Sangat Baik;
4. predikat B dengan nilai >60-70 dengan kategori Baik;
5. predikat CC dengan nilai >50-60 dengan kategori Cukup;
6. predikat C dengan nilai >30-50 dengan kategori Kurang;
7. predikat D dengan nilai 0-30 dengan kategori Sangat Kurang.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 16 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 52. Perbandingan Target dan Capaian IKM 16

IKM. 16. Nilai PM SAKIP Lingkup BPSPL Padang				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Hingga triwulan II 2024 berakhir, belum terdapat realisasi capaian IKM 16 karena pencapaian IKM ini dijadwalkan dalam periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023 – triwulan II 2024 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Nilai PM SAKIP memiliki target 83,75 pada tahun 2024. Dalam hal ini, belum terdapat capaian Nilai PM SAKIP pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dibandingkan.

Tabel 53. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 16 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (nilai)	83	83,15	83,25	83,5	83,75

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai PM SAKIP tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian IKM 16 dapat didukung oleh adanya harmonisasi antara tim pengelola kinerja, dari sub-tim perencanaan, pengukuran, evaluasi, hingga pelaporan. Selain itu, pemahaman tim pengelola kinerja mengenai aspek-aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga diperlukan agar pencapaian nilai dapat maksimal.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi dalam upaya pencapaian IKM 16 berupa pemanfaatan teknologi dalam media penyimpanan dokumen dan aplikasi untuk pertemuan virtual. Di samping itu, dokumen pendukung SAKIP juga telah tertata dalam media penyimpanan *google drive* sehingga tidak tercecer dan terkumpul dengan baik.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 16 dapat ditunjang dengan adanya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkup BPSPL Padang secara konsisten dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, verifikasi, hingga evaluasi kinerja. Selain itu, kepatuhan pelaporan dan pendokumentasian data dukung kinerja juga dapat mendukung perolehan nilai SAKIP.

Evaluasi AKIP tahun 2024 di lingkungan DJPKRL telah dilaksanakan pada 24 s.d. 27 Juni 2024. Adapun nilai AKIP sementara pada BPSPL Padang mencapai 90. Perolehan nilai tersebut bersifat sementara karena akan dibahas lebih lanjut pada rapat pleno.

Tabel 54. Nilai AKIP BPSPL Padang Sementara

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot (%)	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00	27,00	90%
1.a	Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia	6,00	5,40	90%
1.b	Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	9,00	8,10	90%
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15,00	13,50	90%
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00	27,00	90%
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	27,00	90%
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9,00	8,100	90%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15,00	13,50	90%
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	13,50	90%
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan kinerja	3,00	2,70	90%
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4,50	4,05	90%
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7,50	6,75	90%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00	22,50	90%
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	4,50	90%
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	6,75	90%
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja	12,50	11,25	90%

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 16 dapat didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2367.EBD] Layanan Manajemen Kinerja Internal dan Rincian Output (RO) [2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran dan [2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 55. Realisasi Anggaran Rincian Output Pendukung IKM 16

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2367.EBD.952] Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000,00	62.607.193,00	40,5
2	[2367.EBD.953] Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000,00	34.604.858,00	39,3
Total		242.500.000,00	97.212.051,00	40,08

IKM. 17. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Di lingkup KKP, penyelenggaraan SPIP diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPRL yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 17 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 56. Perbandingan Target dan Capaian IKM 17

IKM. 17 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang (Dokumen)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
2	2	2	100	-

Capaian IKM 17 pada triwulan II 2024 telah sesuai target 2 dokumen, yaitu Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan IV 2023 dan Laporan SPIP BPSPL Padang Triwulan I 2024.

Dokumen pendukung:

<https://drive.google.com/file/d/1gSwPkuLYoniGSnAcS6X1AjbKzrto2lZf/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/13fsTbrqIWatP5mO3eXu88Y8rY5UVGeBR/view?usp=sharing>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Realisasi IKM 17 pada triwulan II 2023 dan triwulan II 2024 adalah sama, yaitu dua dokumen. Maka dari itu, tidak terdapat persentase kenaikan capaian IKM 17 pada triwulan II 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Capaian IKM 17 pada triwulan II 2024 telah mencapai 50% dari target tahunan, yaitu dengan tercapainya dua dokumen dari target tahunan empat dokumen.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 57. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 17 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Nilai Maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (level)	3	3	3	3	3

Dalam hal ini, Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Nilai Maturitas SPIP tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 17 didukung dengan adanya kegiatan FGD Manajemen Risiko untuk memetakan faktor-faktor risiko yang kemungkinan terjadi. Pengendalian Risiko Kegiatan BPSPL Padang dibuat berdasarkan hasil masukan dari pelaksana kegiatan kemudian hasilnya dikoordinasikan untuk diantisipasi dan dijadikan bahan masukan dalam persiapan kegiatan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada kegiatan monitoring upaya pengendalian di BPSPL Padang yang secara umum memanfaatkan teknologi komunikasi dan media penyimpanan data berbasis daring. Selain itu, dalam pelaksanaannya pun tim didukung dengan aplikasi-aplikasi penunjang pelaksanaan anggaran, pelayanan peredaran jenis, pemungutan PNBPN, hingga pelaporan berkala.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian IKM ini didukung dengan implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan kegiatan dengan menyertakan data dukung pengendalian risiko yang dilaporkan secara berkala. Lebih lanjut, BPSPL Padang juga menerapkan implementasi pemantauan risiko secara berkala dan menyeluruh.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 17.

IKM. 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang telah memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Dalam pencapaian IKM ini, digunakan system informasi manajemen pengetahuan melalui portal *Collaboration Office*.

Penghitungan capaian berdasarkan poin keaktifan Kepala UPT melakukan posting berbagi pengetahuan dengan target 3 poin dan nilai maksimal yang dapat diterima adalah 4 poin per triwulan. Penghitungan poin berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:

- Unggah dokumentasi kegiatan rapat/seminar/workshop/diseminasi dilengkapi foto dan notulensi serta narasi memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai bobot poin 0,5. Dalam hal unggah kegiatan Apel Pagi tidak mendapatkan nilai.
- Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 1.
- Berbagi informasi berupa video atau campaign dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai bobot poin 3.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut dengan penghitungan sesuai rumus:

$$\text{Keaktifan} = \frac{\text{Jumlah Poin Keaktifan Pejabat}}{\text{Jumlah Target Poin Keaktifan Pejabat}} \times 100\%$$

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 18 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 58. Perbandingan Target dan Capaian IKM 18

IKM. 18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)				
Realisasi Triwulan II 2023	Triwulan II 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
100	94	133,33	141,84 atau 120 (aplikasi Kinerjaku)	33,33

Capaian IKM 18 pada triwulan II 2024 adalah 133,33%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 141,84% atau 120% berdasarkan persentase maksimal perhitungan aplikasi Kinerjaku.

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lz0nO0hgETOlvpBqIQSs9hIVD0BZMa9M>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada triwulan II 2023, capaian IKM 18 adalah 100%. Maka dari itu, terdapat kenaikan capaian 33,33% pada triwulan II 2024 karena realisasi capaian pada periode tersebut adalah 133,33%.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Capaian IKM ini pada triwulan II 2024 telah melampaui target tahunan dengan persentase capaian 141,84% atau 120% mengacu pada persentase maksimal aplikasi Kinerjaku.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar memiliki target 90 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan II 2024 telah mencapai 148,14% dari target Renstra DJPRL tahun 2024.

Tabel 59. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 18 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen		Target				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	82	84	86	88	90

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh keaktifan Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dalam membagikan informasi kegiatan dan infografis menggunakan portal *Collaboration Office*.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada pencapaian IKM 18 terdapat pada pemanfaatan sarana teknologi dan informasi untuk lebih proaktif dalam input data di portal.kkp.go.id sehingga terjadi peningkatan capaian kinerja BPSPL Padang dalam menyampaikan informasi kegiatan setiap triwulannya.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian IKM ini adalah diluncurkannya portal *Collaboration Office* yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Portal ini telah menyediakan layanan pengetahuan yang dapat digunakan untuk membagikan informasi kegiatan berupa berita, infografis, hingga video.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 18.

IKM. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

IKM ini menilai rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada BPSPL Padang berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti, baik berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BPSPL Padang yang menjadi objek pengawasan. Capaian IKM ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 s.d triwulan III tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 19 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

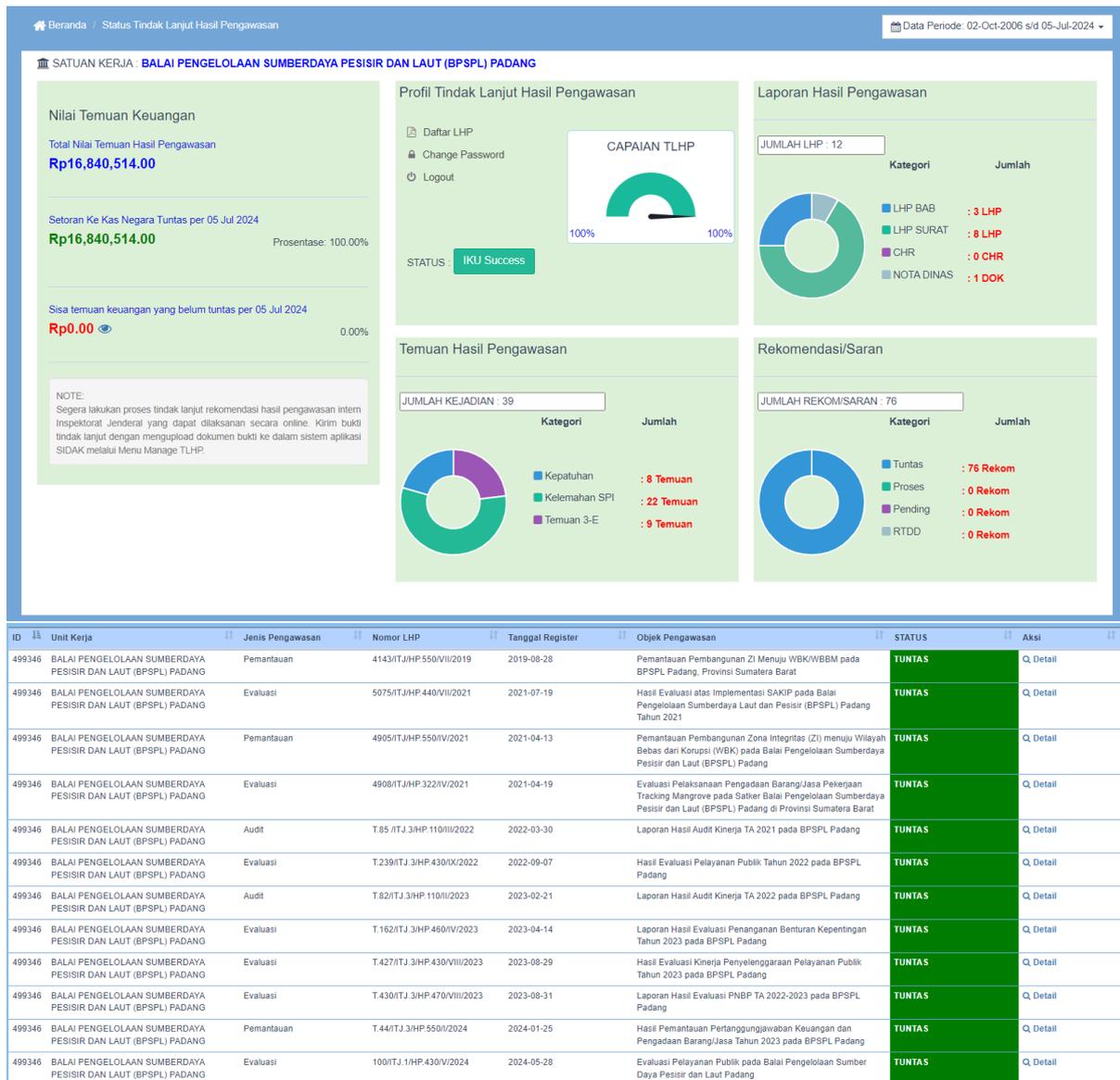
Tabel 60. Perbandingan Target dan Capaian IKM 19

IKM. 19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
100	80	100	125 atau 120 (aplikasi Kinerjaku)	-

Capaian IKM 19 pada triwulan II 2024 adalah 100%. Capaian tersebut menghasilkan persentase capaian 125% atau 120% berdasarkan persentase maksimal perhitungan aplikasi Kinerjaku. Adapun dalam perkembangannya, hingga triwulan II 2024 BPSPL Padang telah menindaklanjuti dengan tuntas rekomendasi-rekomendasi pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagaimana terlampir.

Tabel 61. Status Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Hingga Triwulan II 2024

No	Jenis Pengawasan	Nomor LHP	Objek Pengawasan	Jumlah Rekomendasi	Status
1	Pemantauan	T.44/ITJ.3/HP.550/II/2024	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 pada BPSPL Padang	6	Tuntas
2	Evaluasi	100/ITJ.1/HP.430/V/2024	Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang	4	Tuntas



Gambar 59. Status Tindak Lanjut Hasil Pemantauan terhadap BPSPL Padang
(Sumber: Aplikasi SIDAK, Juli 2024)

Data dukung:

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1M2K8UnWP2WjAz5Q1vk2G5W7s3b8Htbho>

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Pada triwulan II 2023, capaian IKM ini adalah 100%. Maka dari itu, tidak terdapat kenaikan capaian pada triwulan II 2023 dan triwulan II 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Capaian IKM ini pada triwulan II 2024 telah melampaui target tahunan dengan persentase capaian 125% atau 120% mengacu pada persentase maksimal aplikasi Kinerjaaku. Capaian ini dapat dipertahankan jika BPSPL Padang dapat senantiasa menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi selama tahun 2024 ini.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan

Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024, capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja memiliki target 80 pada tahun 2024. Dalam hal ini, persentase capaian BPSPL Padang pada triwulan II 2024 telah mencapai 125% dari target Renstra DJPRL dan tahun 2024.

Tabel 62. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 19 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	60	65	70	75	80

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian IKM 19 didukung oleh adanya monitoring menyeluruh terhadap rekomendasi Inspektorat Jenderal terhadap BPSPL Padang. Dalam tindak lanjutnya, tim BPSPL Padang dimudahkan dengan adanya aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang dapat menampilkan data temuan beserta status tindak lanjutnya. Dalam hal ini, penanggung jawab temuan harus menindaklanjuti catatan dari Inspektorat Jenderal sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada pencapaian IKM 14 melalui penggunaan aplikasi SIDAK <https://sidak.kkp.go.id/> yang memudahkan BPSPL Padang dan tim Inspektorat Jenderal untuk memantau proses tindak lanjut hasil pengawasan. Aplikasi SIDAK juga telah mengakomodir penyampaian dokumen tindak lanjut tersebut sehingga dokumentasi menjadi lebih terarsip dengan rapi.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 19 dapat ditunjang oleh adanya upaya pendampingan oleh APIP terhadap kegiatan di BPSPL Padang. Dengan adanya pendampingan tersebut, ke depannya BPSPL Padang dapat meminimalisir jumlah temuan pada kegiatan serupa.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 19.

IKM. 20. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)

Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK BPSPL Padang Tahun 2023. Capaian IKM ini dihitung dari persentase perbandingan jumlah temuan LHP yang diselesaikan dengan Jumlah temuan, sebagaimana rumus berikut.

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK BPSPL Padang yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK BPSPL Padang}} \times 100\%$$

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 20 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 63. Perbandingan Target dan Capaian IKM 20

IKM. 20. Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang (%)				
Triwulan II 2023	Triwulan II 2024			
	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2023, capaian IKM 20 belum diperoleh karena IKM ini dijadwalkan tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023 – triwulan II 2024 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Tidak terdapat indikator kinerja pada Rencana Strategis DJPRL yang dapat dibandingkan secara langsung dengan indikator ini.

Tabel 64. Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 yang Berkaitan dengan IKM 20 BPSPL Padang

Program Dukungan Manajemen						
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut (%)	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1

Dalam hal ini, Persentase Penyelesaian Temuan Lingkup BPSPL Padang merupakan indikator pendukung dalam pencapaian target Renstra DJPRL 2020-2024 karena memiliki nomenklatur dan satuan berbeda. Maka dari itu, jika dibandingkan dengan target jangka menengah, indikator kinerja ini memiliki sifat kontributif yang tidak dapat dibandingkan capaiannya.

Pada perbandingan dengan standar nasional, dilakukan perbandingan dengan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024 sebagai acuan. Dalam hal ini, Persentase Penyelesaian Temuan tidak termasuk dalam indikator kinerja KKP tahun 2020-2024, melainkan diturunkan ke unit kerja eselon 1 di bawahnya. Maka dari itu, tidak terdapat perbandingan capaian indikator ini dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Perlu dilakukan pengawasan secara berjenjang dalam penggunaan anggaran oleh Kepala BPSPL Padang. Setiap pertanggungjawaban keuangan harus mencantumkan bukti otentik dan konfirmasi langsung kepada pengguna anggaran. Sebagai antisipasi, BPSPL Padang perlu senantiasa menjalankan tugas dan fungsinya dengan disertai penerapan nilai-nilai akuntabilitas untuk meminimalisir temuan.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan anggaran, terdapat efisiensi pada penggunaan Pemegang Uang Muka Kegiatan sebagai upaya mencegah penggunaan anggaran yang melebihi pagu. Selain itu, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan juga telah dilaksanakan secara berjenjang.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Keberhasilan pencapaian IKM 20 dapat ditunjang dengan adanya evaluasi kinerja dan anggaran yang dilaksanakan setiap triwulannya. Pada kesempatan tersebut, dibahas secara tuntas perkembangan isu yang terdapat di BPSPL Padang, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini, BPSPL Padang memperhatikan aspek kinerja dan referensi keuangan yang sesuai.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 20.

IKM. 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)

Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain:

- a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
- b. memiliki anggaran besar;
- c. mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional;
- d. mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. merupakan arahan direktif presiden; dan/atau
- f. pertimbangan lainnya.

Ruang lingkup evaluasi adalah kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang dilaksanakan pada tahun 2023 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya yaitu bantuan konservasi. Nilai efektivitas pada Unit Kerja menggunakan nilai yang telah disepakati pada pleno hasil penilaian evaluasi efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Adapun nilai efektivitas diperoleh dari rumus perhitungan **Efektivitas = 80% Pencapaian Tujuan + 10% Integrasi + 10% AT**.

Keterangan:

PT = Pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya atau beroperasinya bantuan pemerintah sesuai target

IG = Integrasi yang diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan atau penerima memahami hak dan kewajibannya setelah menerima bantuan pemerintah

AT = Adaptasi yang diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan atau kemampuan penerima bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya atau kegiatan kelautan dan perikanan

Nilai efektivitas tersebut terbagi ke dalam kategori sebagai berikut:

1. predikat AA dengan nilai >90-100 dengan kategori Memuaskan;
2. predikat A dengan nilai >80-90 dengan kategori Efektif;
3. predikat B dengan nilai >60-80 dengan kategori Cukup Efektif;

4. predikat C dengan nilai >40-60 dengan kategori Kurang Efektif;
5. predikat D dengan nilai 0-40 dengan kategori Tidak Efektif.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 21 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 65. Perbandingan Target dan Capaian IKM 21

IKM. 21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang (%)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-

Pada periode triwulan II 2023, capaian IKM 21 belum diperoleh karena dijadwalkan tahunan. Capaian IKM ini diperoleh dari hasil evaluasi terhadap penerima bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) tahun anggaran 2023, yaitu Kelompok Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kelompok Masyarakat Pengawas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

Tidak terdapat perbandingan capaian pada triwulan II 2023 – triwulan II 2024 karena IKU ini memiliki frekuensi pengukuran tahunan.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM 21 didukung oleh pemahaman menyeluruh terkait aspek-aspek pengukuran efektivitas bantuan pemerintah. Selain itu, kooperasi dari kelompok penerima bantuan dalam menyampaikan data dukung, informasi, dan keterangan yang benar juga dapat menunjang pengukuran yang menyeluruh dan akuntabel. Dalam hal ini, BPSPL Padang telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kelompok sebelum melakukan peninjauan langsung di lapangan untuk mempersiapkan kelompok. Di samping itu, pelibatan dinas sebagai mitra juga dapat mendukung upaya pembekalan kepada kelompok lebih menyeluruh.

Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, Efisiensi terdapat pada kegiatan pra-monev yang dilakukan secara daring. Pada kesempatan tersebut, verifikator BPSPL Padang melakukan diskusi dan wawancara dengan perwakilan kelompok dengan mengacu pada Kertas Kerja Evaluasi yang menjadi acuan

penilaian. Dalam hal ini, pra-monev dapat membantu identifikasi masalah lebih awal sehingga pelaksanaan pemantauan langsung dapat berjalan lebih efisien.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Upaya pencapaian IKM 21 dapat didukung oleh hal berikut.

a. Pra-Monev terhadap Kelompok Penerima Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Tahun Anggaran 2023

Pra-monev pengelolaan bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) bertujuan untuk memperoleh gambaran konkret terkait perkembangan pemanfaatan bantuan. Dengan dilaksanakan pra-monev terlebih dahulu, identifikasi permasalahan dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga pelaksanaan monev secara langsung dapat efektif fokus pada pendampingan penyelesaian masalah.

b. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Bantuan KOMPAK

Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan KOMPAK ditargetkan pada tiga kelompok penerima bantuan tahun anggaran 2023, yaitu Poseidon Diver Mentawai di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kelompok Banyu Biru di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Pokmaswas Hiu Macan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Hingga triwulan II 2024 berakhir, monitoring dan evaluasi telah dilaksanakan terhadap dua kelompok. Hasil pemantauan tersebut akan dituangkan ke dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) Efektivitas Bantuan Pemerintah.



Gambar 60. Dokumentasi Pemantauan terhadap Kelompok Banyu Biru



Gambar 61. Dokumentasi Pemantauan terhadap Pokmaswas Hiu Macan

F. Realisasi Anggaran

Pencapaian IKM 21 didukung dengan alokasi anggaran dari Klasifikasi Rincian Output (KRO) [2362.QEH] Bantuan Kelompok Masyarakat dengan Rincian Output (RO) [2362.QEH.001] Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan komponen kegiatan tersebut.

Tabel 66. Realisasi Anggaran Komponen Pendukung IKM 21

No	Komponen	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	[2362.QEH.001.053] Pendampingan dan Pembinaan KOMPAK	36.050.000,00	14.913.250,00	41,4
	Total	36.050.000,00	14.913.250,00	41,4

Realisasi anggaran pada komponen [2362.QEH.001.053] adalah 41,4.

IKM. 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal
 Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:
 - a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana
2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif
 Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.
3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal
 Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Nilai pengawasan kearsipan internal BPSPL Padang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumberdaya kearsipan. Adapun nilai dan kategori atas hasil pengawasan kearsipan memiliki kriteria sebagai berikut.

Tabel 67. Kriteria Nilai Pengawasan Kearsipan Internal

KATEGORI		INTERVAL SKOR
AA	Sangat Memuaskan	>90 – 100
A	Memuaskan	>80 – 90
BB	Sangat Baik	>70 – 80
B	Baik	>60 - 70
CC	Cukup	>50 - 60
C	Kurang	>30 - 50
D	Sangat Kurang	0 - 30

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Rincian target IKM 22 BPSPL Padang tahun 2024 disajikan dalam tabel di bawah ini.

IKM. 22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang (Nilai)				
Realisasi	Triwulan II 2024			
Triwulan II 2023	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2023-2024
-	-	-	-	-



Pada periode triwulan II 2024, belum terdapat capaian terhadap IKU ini. IKU ini merupakan indikator kinerja yang ditargetkan dengan periode tahunan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya atau Triwulan Sebelumnya

IKM ini tidak terdapat pada tahun 2023 sehingga tidak terdapat perbandingan capaian antara triwulan II 2023 dan triwulan II 2024.

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan Berjalan dengan Target Tahunan

Pada perbandingan capaian kinerja dengan target tahunan, tidak terdapat realisasi capaian pada triwulan II 2024 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan.

Sementara itu, mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023, tidak terdapat dokumen perencanaan jangka menengah pada level Unit Pelaksana Teknis. Maka dari itu, analisis kinerja dengan target jangka menengah dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja BPSPL Padang dengan Rencana Strategis (Renstra) DJPRL tahun 2020-2024 sesuai dengan penjenjangan kinerja. Dalam hal ini, indikator Nilai Pengawasan Internal Kearsipan tidak terdapat pada Rencana Strategis DJPRL 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan.

Ditinjau dari standar nasional, Indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan juga tidak termuat dalam Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024. Maka dari itu, tidak terdapat capaian kinerja yang dapat dibandingkan dengan standar nasional.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pencapaian IKM ini didukung oleh pengelolaan arsip yang memenuhi kriteria penilaian. Dalam hal ini, pengelolaan arsip yang selaras didukung oleh sumber daya manusia dan sarana yang menunjang pengelolaan arsip. Ditinjau dari efisiensi penggunaan sumber daya, terdapat efisiensi pada penggunaan fitur Korespondensi pada laman portal.kkp.go.id yang membantu proses persuratan secara sistematis.

E. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengelolaan arsip didukung dengan kecakapan dan keterampilan arsiparis dalam pengelolaan arsip. Selain itu, pemahaman pegawai BPSPL Padang dalam menggunakan fitur Korespondensi pada aplikasi *Portal Collaboration Office* dalam persuratan juga dapat mendukung pengelolaan arsip lingkup BPSPL Padang.

F. Realisasi Anggaran

Tidak terdapat alokasi anggaran khusus untuk pencapaian IKM 22.

3. 2. Perbandingan Capaian dengan Unit Kerja Sejenis

Perbandingan capaian kinerja BPSPL Padang dengan sampling unit kerja sejenis lainnya pada triwulan II 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 68. Perbandingan Capaian BPSPL Padang dengan Unit Kerja Sejenis

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	Target TW I 2024	Capaian TW II 2024
1 Nilai PNBP (Rp.000)	-	-	-	-
2 Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (Orang)	-	-	-	-
3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun (Dokumen)	-	-	-	-
4 Daerah yang difasilitasi penyusunan usulan penetapan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Daerah)	-	-	-	-
5 Kerjasama Konservasi yang diinisiasi (Kesepakatan)	-	-	-	-
6 Bantuan pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi (KOMPAK) yang diserahkan (Kelompok)	1	2	1	3
7 Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah yang Difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	-	-	-	-
8 Jenis ikan terancam punah yang dilakukan pendataan, penyadartahuan, perbaikan habitat atau pemulihan populasi dan penanganan biota dilindungi (Jenis)	-	-	-	-
9 Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (Jenis)	-	-	-	-
10 Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja (Dokumen)	-	-	-	-
11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran (Kawasan)	-	-	-	-
12 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) (nilai)	83	99,27	83	100
13 Nilai Kinerja Anggaran (nilai)	-	-	-	-
14 Nilai unit kerja berpredikat menuju WBK (Nilai)	-	-	-	-
15 Indeks profesionalitas ASN (indeks)	83	90,92	83	91,92
16 Nilai PM SAKIP (Nilai)	-	-	-	-
17 Laporan SPIP yang Disusun (Dokumen)	2	2	2	2
18 Persentase unit kerja yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94	133,33	94	133,33
19 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80	100	80	100

Indikator Kinerja	BPSPL Padang		BPSPL Makassar	
	Target TW II 2024	Capaian TW II 2024	Target TW I 2024	Capaian TW II 2024
20 Persentase penyelesaian temuan LHP BPK (%)	-	-	-	-
21 Tingkat Efektivitas pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah (%)	-	-	-	-
22 Nilai pengawasan internal kearsipan (nilai)	-	-	-	-

Berdasarkan perbandingan terhadap unit kerja sejenis lainnya, dalam hal ini BPSPL Makassar, kedua unit kerja memiliki enam indikator yang diukur capaiannya pada triwulan II 2024. Tiga dari indikator tersebut memiliki realisasi capaian yang sama. Sementara itu, realisasi capaian BPSPL Makassar pada tiga indikatornya lebih tinggi dibandingkan dengan capaian BPSPL Padang.

3.3. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2024 ini BPSPL Padang didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP-DIPA 032.07.2.499346/2024 sebesar **Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). **Hingga triwulan II 2024, realisasi anggaran mencapai Rp8.696.935.695,00** (Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) **dengan persentase 51,45%**. Adapun realisasi anggaran BPSPL Padang secara rinci disajikan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 69. Realisasi Anggaran BPSPL Padang Hingga Triwulan II 2024

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang		16.904.860.000,00	8.696.935.695,00	51,45
2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				
2362.PBW.001	Rekomendasi Pengelolaan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	50.000.000,00	-	-
2362.PEC.001	Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	70.000.000,00	5.725.000,00	8,2
2362.QEH.001	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	400.000.000,00	234.809.070,00	58,7
2362.RAL.001	Sarana Pendukung Penyelenggaraan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	172.800.000,00	-	-
2362.REB.001	Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	900.000.000,00	429.407.141,00	47,7
2362.REB.002	Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dikelola Pemanfaatannya secara Berkelanjutan	1.227.200.000,00	425.245.707	34,7
2362.SCC.002	Masyarakat Pemanfaat Kawasan Konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya	200.000.000,00	-	-



Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2362.UBA.001	Pemerintah Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	150.000.000,00	5.593.707,00	3,7
2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				
2363.PBW.002	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	100.000.000,00	66.718.054,00	66,7
4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
4346.QDD.001	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diberikan Penyadaran terhadap Penanggulangan Dampak Pencemaran	800.000.000,00	393.371.240,00	49,2
2366 Perencanaan Ruang Laut				
2366.PBT.009	Rekomendasi Kebijakan Monitoring dan Verifikasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut	1.100.000.000,00	369.901.163,00	33,6
2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut				
2367.CAN.001	Perangkat Pengolah Data dan Informasi	287.000.000,00	286.225.650,00	99,7
2367.EBA.956	Layanan BMN	62.500.000,00	46.412.266,00	74,3
2367.EBA.957	Layanan Hukum	210.000.000,00	85.580.355,00	40,8
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	44.233.000,00	22.318.040,00	50,5
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	209.600.000,00	118.082.716,00	56,3
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	10.274.860.000,00	5.837.043.631,00	56,8
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	325.367.000,00	221.406.792,00	68
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	154.500.000,00	62.607.193,00	40,5
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	88.000.000,00	34.604.858,00	39,3
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	78.800.000,00	51.883.112,00	65,8

IV. Penutup

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan pengukuran kinerja hingga periode Triwulan II 2024, terdapat 22 Indikator Kinerja (IK) di lingkup BPSPL Padang dengan jangka waktu target bersifat triwulanan, semesteran, dan tahunan yang juga disampaikan perkembangan kegiatannya. Adapun hasil pengukuran kinerja menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://kinerjaku.kkp.go.id/> menunjukkan **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh BPSPL Padang pada triwulan II 2024 adalah 117,41 (kategori istimewa)**.

Berikut disampaikan capaian masing-masing indikator kinerja BPSPL Padang pada triwulan II 2024:

1. Nilai PNBP BPSPL Padang dengan target Rp650.000,000 belum diukur capaiannya karena memiliki periode pengukuran tahunan,
2. Tenaga Kerja yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 320 Orang belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
4. Daerah yang Difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 3 Daerah belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
5. Kerja Sama Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Kesepakatan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
6. Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang Diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target tahunan 3 Kelompok dan target pada triwulan II 1 Kelompok; telah tercapai 2 Kelompok pada triwulan II.
7. Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru dengan target 1 Kelompok belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
8. Jenis Ikan Terancam Punah yang Dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 8 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan II karena memiliki periode pengukuran tahunan.
9. Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 5 jenis tidak dilakukan pengukuran pada triwulan II karena memiliki periode pengukuran tahunan.
10. Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang Diidentifikasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 1 Dokumen belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
11. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran di Wilayah Kerja BPSPL Padang dengan target 4 Kawasan belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 93,76 dan target triwulan II 83; telah mencapai 99,27 pada triwulan II.
13. Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang dengan target 86 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
14. Nilai Unit Kerja Berpredikat menuju WBK di BPSPL Padang dengan target 75 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
15. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPSPL Padang dengan target tahunan 88 dan target triwulan II 83; telah tercapai 90,92 pada triwulan II.

16. Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang dengan target 81 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
17. Laporan SPIP yang Disusun lingkup BPSPL Padang telah mencapai 2 dokumen dari target tahunan 4 dokumen; capaian sesuai dengan target triwulannya.
18. Persentase Unit Kerja Lingkup BPSPL Padang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar telah mencapai 133,33% dari target 94%.
19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan telah mencapai 100% dari target 80%.
20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BPSPL Padang dengan target 100% belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah Lingkup BPSPL Padang dengan target 80 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.
22. Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BPSPL Padang dengan target 65 belum memperoleh capaian karena memiliki periode pengukuran tahunan.

Berdasarkan uraian capaian tersebut, BPSPL Padang telah mencapai seluruh indikator kinerja yang dijadwalkan pada triwulan II 2024 dengan persentase $\geq 100\%$. Pencapaian tersebut juga didukung dengan adanya alokasi **pagu anggaran sejumlah Rp16.904.860.000,00** (Enam Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Dari total anggaran tersebut, 87,64% bersumber dari Rupiah Murni sementara 12,36% bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam perkembangannya, seluruh pagu anggaran yang sempat terdampak blokir telah dibuka pada tanggal 20 Juni 2024. **Hingga triwulan II 2024, realisasi anggaran mencapai Rp8.696.935.695,00** (Delapan Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) **dengan persentase 51,45%**. Adapun efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target tersebut belum menunjukkan nilai akhir karena periode pengukurannya yang berlangsung tahunan.

Dalam perkembangannya, tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian target triwulan II 2024. Namun demikian, terdapat hal yang perlu diantisipasi untuk pencapaian kinerja periode ke depan, yaitu terdapat pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal dan target pencapaian *output* kegiatan,

4.2. Rekomendasi

A. Tindak lanjut Rekomendasi Triwulan I 2024

Rekomendasi pada triwulan I 2024 adalah melaksanakan monitoring Rencana Penarikan Dana (RPD) dan penyelesaian laporan pendataan teripang. Dalam upaya tindak lanjutnya, BPSPL Padang telah melaksanakan monitoring RPD dan memantau keselarasan antara target dan realisasi penyerapan anggaran. Dalam hal penyelesaian laporan pendataan teripang, laporan telah terselesaikan dan terdokumentasikan pada April 2024.

B. Rekomendasi Triwulan III 2024

Untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024, langkah yang dapat dilakukan adalah melaksanakan rewiu Rencana Aksi.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BPSPL Padang Tahun 2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL sespridirenprl@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

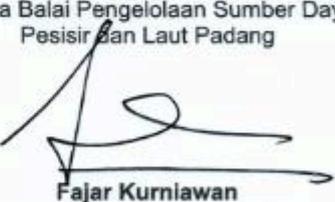
Nama : **Fajar Kurniawan**
Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 Januari 2024

<p>Pihak Kedua Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut</p>  <p>Victor Gustaaf Manoppo</p>	<p>Pihak Pertama Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang</p>  <p>Fajar Kurniawan</p>
---	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (BPSPL)
 PADANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Nilai PNBP BPSPL Padang	1.	Nilai PNBP BPSPL Padang (Rp.000)	650.000
2.	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang	2.	Tenaga Kerja yang terlibat dalam Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut di wilayah kerja BPSPL Padang (Orang)	320
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BPSPL Padang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	3
4.	Terverifikasinya kesesuaian usulan penetapan kawasan konservasi di tingkat daerah di Wilayah Kerja BPSPL Padang	4.	Daerah yang difasilitasi Penyusunan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Daerah)	3
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Konvensi dan Kontribusi Kerjasama, Jejaring, dan Kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BPSPL Padang	5.	Kerjasama Konservasi yang diinisiasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kesepakatan)	1
6.	Meningkatnya Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam mendukung Konservasi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	6.	Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yang diserahkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Kelompok)	3
		7.	Kelompok Masyarakat di Kawasan Konservasi Daerah pada Wilayah Kerja BPSPL Padang yang difasilitasi Pengembangan Mata Pencaharian Baru (Kelompok)	1

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
7.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	8.	Jenis Ikan Terancam Punah yang dilakukan Pendataan, Penyadartahuan, Perbaikan Habitat atau Pemulihan Populasi dan Penanganan Biota Dilindungi di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	8
8.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan di Wilayah Kerja BPSPL Padang	9.	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja BPSPL Padang (Jenis)	5
9.	Terfasilitasinya Pemanfaatan Air Laut Selain Energi di Wilayah Kerja BPSPL Padang	10.	Pemanfaatan Air Laut Selain Energi yang diidentifikasi di wilayah kerja BPSPL Padang (Dokumen)	1
10.	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direstorasi dalam rangka penanggulangan pencemaran	11.	Kawasan Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang dilakukan Penanggulangan Pencemaran di wilayah kerja BPSPL Padang (Kawasan)	4
11.	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup BPSPL Padang	12.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPSPL Padang (Nilai)	93,76
		13.	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPSPL Padang (Nilai)	86
		14.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di BPSPL Padang (Nilai)	75
		15.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BPSPL Padang (Indeks)	88
		16.	Nilai PM SAKIP lingkup BPSPL Padang (Nilai)	81
		17.	Laporan SPIP yang disusun lingkup BPSPL Padang (Dokumen)	4
		18.	Persentase Unit Kerja lingkup BPSPL Padang yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	19. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup BPSPL Padang yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	80
	20. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK lingkup BPSPL Padang (%)	100
	21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup BPSPL Padang (%)	80
	22. Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup BPSPL Padang (nilai)	65

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	1.100.000.000
2.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	3.170.000.000
3.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	800.000.000
4.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	100.000.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	11.734.860.000
Total Anggaran Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang Tahun 2024		16.904.860.000

Jakarta, 25 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut



Victor Guetaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya
Pesisir dan Laut Padang



Fajar Kurniawan



Lampiran 2. Sertifikat BPSPL Padang





Registration No : QAIC / ID / 11112 – A

BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PADANG

Location

Jl. Raya Pertanian, Sei Duo - Sungai Lareh, Lubuk Minturun, Kec. Koto Tangah, Kota Padang,
Sumatera Barat

Registered Activities :

1. Surat Angkut Jenis Ikan (SAJI) Dalam Negeri
2. Surat Rekomendasi

Certificate Issue Date : 02 February 2023 - Re-assessment Date : 02 February 2024
Date of Initial Registration : 02 February 2023 - Certificate Expiry Date : 02 February 2026

This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by The Governing Board

QA INDONESIA CERTIFICATION

Address: Surabaya St No.11, Menteng, Jakarta 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website: www.qai.co.id







Lampiran 3. Penghargaan BPSPL Padang





Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan

